



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2025



DINAS PENDIDIKAN

📍 Jl. Perintis Kemerdekaan No.75,
Karangbawang, Purwokerto Kulon, Kec.
Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53142

☎ +0281-635220

🌐 dindik.banyumaskab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH 2025



DINAS PENDIDIKAN

📍 Jl. Perintis Kemerdekaan No.75,
Karangbawang, Purwokerto Kulon, Kec.
Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53142

☎ +0281-635220

🌐 dindik.banyumaskab.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

PENGARAH:

DRS. JOKO WIYONO, M.SI

PENANGGUNGJAWAB:

WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP., M.A.P.

EDITOR DAN PENULIS NASKAH:

PRAMUDYA ADITAMA VIDYABRATA, S.T, M.PI, M.T

PENGOLAH DATA:

ABDUL AZIS SETIAWAN, A.Md
ADI NUR WARNINGSIH, S.I.Pust.
AJMI HASNANI, A.Md.Akun.
ANNISA ADELITA, A.Md.
ANNISA QOTRUN NADA, S.Pd.
ARTININGSIH, S.SOS
DESY KURNIA ASTUTI, A.Md
LINDA FITRIANA RUMADANI, S.Pd.
MARTHIKASARI NUR ISTIQOWENTHI KUSUMANINGRUM, S.E.
MURYANTI, S.SOS
RIANAWATI ROHMANINGSIH, S.E.
SRI UNIASIH
SUNARTO
SUWANTI HARTININGSIH
TRUBUS PRIYONO, A.MD.AKUN
WAGIYEM. S.SOS

DESIGN:

PRAMUDYA ADITAMA VIDYABRATA, S.T, M.PI, M.T

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75, Karangbawang, Purwokerto Kulon,
Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos: 53142

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Alloh Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah atas penggunaan anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Berbagai masukan dan saran terbuka untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Purwokerto, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. Joko Wiyono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660217 19990303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	4
1.3. Susunan Organisasi	7
1.4. Sumber Daya Aparatur	14
1.5. Isu Strategis	15
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Rencana Strategis	20
2.1.1. Visi dan Misi RPJPD Pemkab Banyumas Bidang Pendidikan	20
2.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Mendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas	27
2.1.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	28
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025	31
2.3. Rencana Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2025	35
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1. Capaian Kinerja Organosasai	40
3.2. Analisis Capaian Kinerja	42
3.2.1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	42
3.2.1.1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	42
3.2.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. 2025 Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	43
3.2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Pada Renstra	45
3.2.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)	46
3.2.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja, Serta Solusi Yang Telah Dilakukan	47
3.2.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	49

3.2.1.7.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	52
3.2.2.	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Akses Pendidikan	54
3.2.2.1.	Perbandingan antara Target Sasaran Tahun 2025 dengan Realisasi Sasaran Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.	54
3.2.2.2.	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Sasaran Tahun 2022 s.d. Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	55
3.2.2.3.	Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2025 Dengan Target Akhir Pada Renstra.	57
3.2.2.4.	Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)	58
3.2.2.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Sasaran, Serta Solusi Yang Telah Dilakukan	59
3.2.2.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	61
3.2.2.7.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	63
3.3.	Realisasi Anggaran	69
3.4.	Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	70
3.4.1.	Efektivitas Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	70
3.4.2.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	72
3.4.3.	Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	74
3.5.	Prestasi, Penghargaan Dan Inovasi	75
3.5.1.	Prestasi dan Penghargaan	75
3.5.2.	Inovasi Dinas Pendidikan	80
BAB 4.	PENUTUP	83

DAFTAR GAMBAR

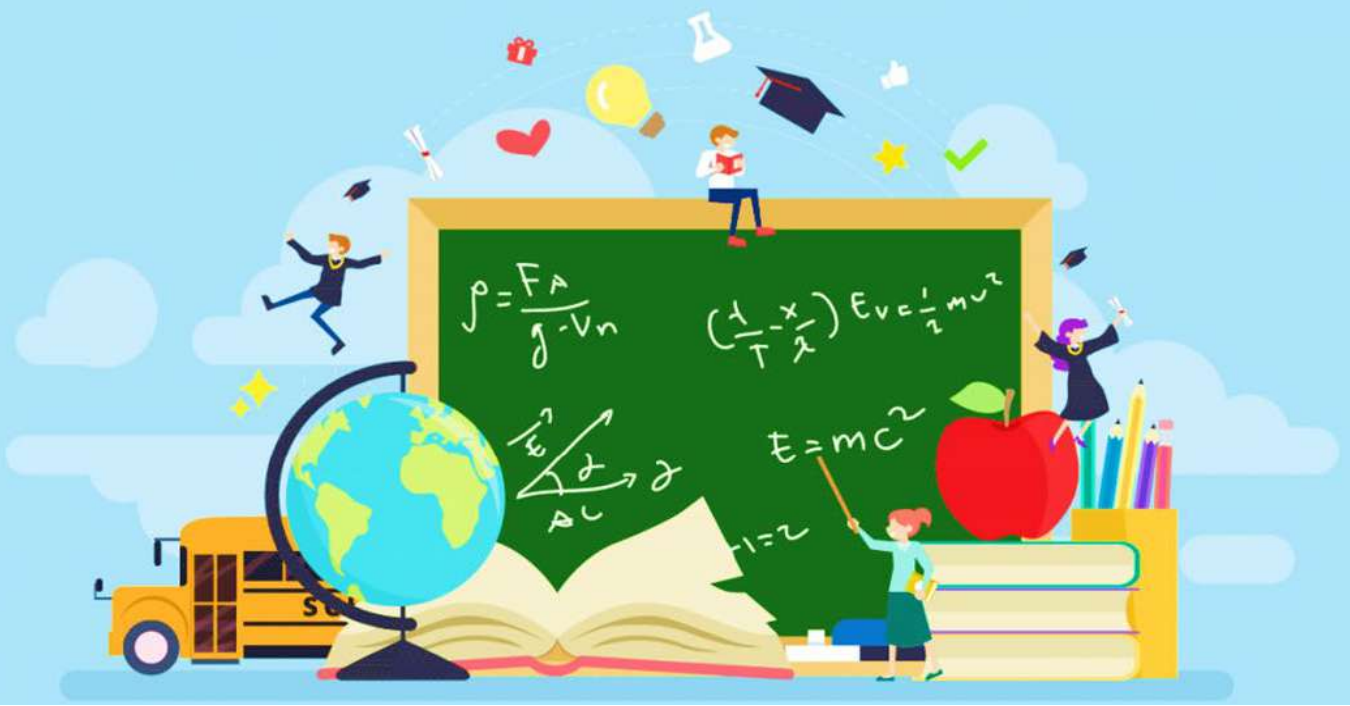
Gambar 1.	Struktur dan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	8
Gambar 2.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	33
Gambar 3.	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sebaran Pegawai di Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwil), SMPN, SDN dan TKN serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) per Kecamatan Tahun 2025	13
Tabel 1.2.	ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	14
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal per Golongan	15
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026	29
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	32
Tabel 2.3.	Rencana Anggaran Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Semula dan Sesudah) TA. 2025	36
Tabel 3.1.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025	41
Tabel 3.2.	Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	42
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 s.d 2025	44
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	45
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Barlingmascakeb	46
Tabel 3.6.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	50
Tabel 3.7.	Target dan Realisasi Kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	52
Tabel 3.8.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	54
Tabel 3.9.	Perbandingan Capaian Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 s.d 2025	55
Tabel 3.10.	Perbandingan Capaian Sasaran Tahun 2025 dengan Target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	57
Tabel 3.11.	Perbandingan Realisasi Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Barlingmascakeb	58
Tabel 3.12.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	61
Tabel 3.13.	Perbandingan Antara Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Capaian Program/Kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	63
Tabel 3.14.	Efektivitas Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	71
Tabel 3.15.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	72
Tabel 3.16.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	72
Tabel 3.17.	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025	74

BAB I.

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pendidikan merupakan pilar utama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyumas. Sebagai instansi yang mengemban amanat urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Tahun 2025 menjadi periode krusial karena merupakan tahun awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Periode 2025-2029. Fokus utama pada tahun ini diarahkan pada penguatan aksesibilitas pendidikan, terutama dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, serta percepatan program penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Selain aspek aksesibilitas, dinamika pendidikan di Banyumas pada tahun 2025 juga diwarnai dengan upaya Digitalisasi dan Modernisasi Ekosistem Belajar. Langkah ini diambil untuk merespons kebutuhan pembelajaran abad ke-21 dan memastikan efisiensi birokrasi pendidikan melalui integrasi sistem informasi. Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan tetap memperhatikan mitigasi risiko strategis, mulai dari pengelolaan anggaran pendidikan hingga pemerataan kualitas sarana prasarana di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Pembangunan pendidikan merupakan pilar utama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyumas. Sebagai instansi yang mengemban amanat urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Tahun 2025 menjadi periode krusial karena merupakan tahun awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Periode 2025-2029. Fokus utama pada tahun ini diarahkan pada penguatan aksesibilitas pendidikan, terutama dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, serta percepatan program penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Selain aspek aksesibilitas, dinamika pendidikan di Banyumas pada tahun 2025 juga diwarnai dengan upaya Digitalisasi dan Modernisasi Ekosistem Belajar. Langkah ini diambil untuk merespons kebutuhan pembelajaran abad ke-21 dan memastikan efisiensi birokrasi pendidikan melalui integrasi sistem informasi. Namun, dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan tetap memperhatikan mitigasi risiko strategis, mulai dari pengelolaan anggaran pendidikan hingga pemerataan kualitas sarana prasarana di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. LKjIP sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas sangat penting bagi Dinas Pendidikan sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta capaian target indikator kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2025. LKjIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2025 untuk mendorong instansi pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang secara khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan pendidikan, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada Tahun 2025 yang diharapkan menjadi suatu evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai pada periode Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja.

Secara keseluruhan, LKjIP ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kendali manajerial, tetapi juga sebagai media komunikasi kepada publik mengenai sejauh mana kontribusi Dinas Pendidikan dalam mencapai indikator makro pendidikan daerah selama tahun 2025.

1.2. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang bersifat Wajib dan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasinya pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan atributif dalam menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai batasan wilayah dan jenjang kependidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten.

Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Pembinaan PAUD dan Dikmas.
2. Pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Pembinaan PAUD dan Dikmas.
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Pembinaan PAUD dan Dikmas.
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain itu, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Adapun rincian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Formal maupun Non-Formal (TK, KB, TPA, dan SPS);
 - b. Pendidikan Dasar: Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta; dan
 - c. Pendidikan Non-Formal: Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) serta pendidikan masyarakat/kursus.
2. Kurikulum dan Penilaian. Kewenangan dalam aspek substansi pembelajaran meliputi:

- a. Penetapan dan implementasi Kurikulum Muatan Lokal untuk jenjang Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal yang relevan dengan potensi daerah Kabupaten Banyumas; dan
 - b. Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar dan koordinasi pelaksanaan asesmen nasional di tingkat satuan pendidikan dasar.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Kewenangan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan mencakup:
 - a. Pembinaan, pengembangan profesi, dan penataan distribusi pendidik (Guru) serta Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik) dalam lingkup Kabupaten Banyumas; dan
 - b. Pengelolaan kesejahteraan dan pemenuhan kualifikasi akademik PTK sesuai standar nasional.
4. Perizinan dan Akreditasi.
 - a. Penerbitan izin operasional/pendirian serta penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan PNF; dan
 - b. Fasilitasi penjaminan mutu dan persiapan akreditasi satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada enam suburusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah, dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan nonformal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian pula dengan urusan kurikulum muatan lokal. Dengan ciri khas kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing daerah. Untuk Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan kurikulum muatan lokal melalui Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 50 Tahun 2015 tentang penerapan mata pelajaran muatan lokal Bahasa Banyumasan pada Satuan Pendidikan.

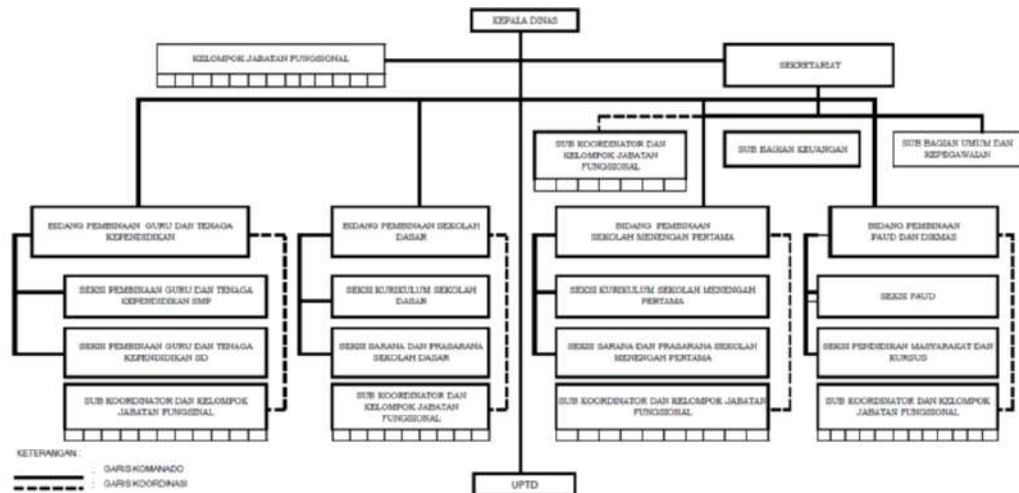
1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (Sekretaris) dan 4 (empat) Kepala Bidang. Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan;
3. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Sub Koordinator Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas;
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, antara lain:
 - a. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
6. Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas antara lain:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus; dan
 - c. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Banyumas, Berikut bagan Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada Gambar 1. dibawah ini.



Gambar 1. Struktur dan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Adapun deskripsi kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Dinas Pendidikan;
 - a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan,

- organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Ka Subbag, yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 1 orang Sub Koordinator Perencanaan dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- 1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar serta Sub Koordinator dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan

- pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga kependidikan.
4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pembinaan Sekolah Dasar dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar serta dibantu dengan 1 (satu) orang Sub Koordinator, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kurikulum Sekolah Dasar;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 - c. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama serta dibantu oleh 1 (satu) orang sub koordiantor, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan

- kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
6. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus serta 1 (satu) orang Sub Koordinator dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
 - c. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
7. UPTD dan uraian tugas pada UPTD diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan tugas sebagai berikut:
- a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pendidikan dapat dibentuk UPTD;
 - b. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD dan uraian tugas pada UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Pendidikan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan

mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Jumlah Jabatan Fungsional sditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap jabatan fungsional mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing;
- d. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian jabatan dan promosi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Koordinator Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing;
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional dan/atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala badan;
- h. Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional pada Peraturan Bupati Banyumas dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah dapat secara langsung mendayagunakan pejabat Fungsional dimaksud diluar tugas tambahannya;
 - 3) Penugasan Pejabat Fungsional berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas yang berasal dari unit kerja pemilik kinerja; dan
 - 5) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit kerja.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, terdiri dari:

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Korwil;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri 2 (dua) Satuan Pendidikan;
 - a. Satuan Pendidikan Formal terdiri 3 (tiga), yakni:
 - 1) Taman Kanak-Kanak sebanyak 9 (sembilan) TK;
 - 2) Sekolah Dasar sebanyak 761 (tujuh ratus enam puluh satu) SD;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) SMP;
 - b. Satuan Pendidikan NonFormal sebanyak 3 (tiga) SKB, dengan sebaran dimasing-masing kecamatan sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini;

Tabel 1.1. Sebaran Pegawai di Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwil), SMPN, SDN dan TKN serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) per Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Pelaksana/ Korwil	Satuan Pendidikan			
			Formal			Non Formal
			SMPN	SDN	TK	SKB
1	Ajibarang	14	29	124	-	1
2	Banyumas	5	25	68	-	-
3	Baturraden	11	19	82	-	-
4	Cilongok	12	26	158	-	-
5	Gumelar	8	23	116	-	-
6	Jatilawang	8	18	112	-	-
7	Kalibagor	8	28	77	-	1
8	Karanglewas	11	26	85	-	-
9	Kebasen	12	27	131	-	-
10	Kedungbanteng	8	36	83	-	-
11	Kembaran	15	25	143	-	-
12	Kemranjen	10	20	144	-	-
13	Lumbir	3	18	132	-	-
14	Patikraja	7	17	112	-	-
15	Pekuncen	8	23	102	-	-
16	Purwojati	6	16	46	5	-
17	Purwokerto Barat	6	13	75	5	-
18	Purwokerto Selatan	13	27	110	6	-
19	Purwokerto Timur	12	57	111	5	-
20	Purwokerto Utara	13	19	103	6	2
21	Rawalo	9	19	51	2	-
22	Sokaraja	15	30	122	-	-
23	Somagede	8	18	76	-	-
24	Sumbang	11	31	107	-	-
25	Sumpiuh	21	31	93	2	-
26	Tambak	9	21	119	3	-
27	Wangon	13	31	171	2	-
JUMLAH		276	673	2,853	36	4

1.4. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ASN dan Non PNS, Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan.

Jumlah ASN pada Dinas Pendidikan berjumlah 8.561 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 4.439 (*Empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan*) orang dan PPPK sejumlah 4.093 (*Empat ribu sembilan puluh tiga*) orang. Perincian ASN berdasarkan golongan dapat terlihat pada Tabel 1.2. dibawah ini.

Tabel. 1.2.
ASN Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Pegawai	Jenis Kelamin			Golongan (PNS)					Golongan (PPPK)				
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah	01	05	07	09	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1,604	2,835	4,439	11	321	3,007	1,100	4,439	-	-	-	-	-
PPPK	1,213	2,880	4,093	-	-	-	-	-	27	93	15	3,958	4,093
Jumlah	3,812	6,475	8,532	11	321	3,007	1,100	4,439	27	93	15	3,958	4,093

Sumber : BKPSDM dan BKAD Kab. Banyumas, 2025

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan formal per golongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan
berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal per Golongan

Jenjang Pendidikan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah	Proporsi %
SD	5	5	-	-	10	0.23
SMP	4	53	1	-	58	1.31
SMA	-	203	70	-	273	6.15
D-II/Sarjana Muda / Akademi	-	19	9	2	30	0.68
D-III/DIV	-	20	16	2	38	0.86
S-1		14	2,843	981	3,803	85.67
S-2	-	-	113	111	224	5.05
S-3	-	-	1	2	3	0.07
Jumlah	9	314	3,033	1,083	4,439	100%

Sumber : Simpeg Banyumas, Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2025

1.5. ISU STRATEGIS

Gambaran kondisi Kabupaten Banyumas yang telah diuraikan pada RPJMD Kabupaten Banyummas menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2024. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan tidak bisa diperkirakan dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas. Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam masa transisi melalui Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan.

Pembangunan Kabupaten Banyunas saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas 2025-2029. Dinas Pendidikan sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banyunas, memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran misi Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas. Peran strategisnya adalah Fokus Kesejahteraan Sosial, yang mana salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pada Tahun 2025 nilai IPM Kabupaten Banyumas sebesar 75,44 termasuk dalam kategori Tinggi menurut standar United Nations Development Programme (UNDP).

IPM meliputi empat komponen yaitu komponen umur harapan hidup saat lahir, komponen pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Nilai IPM Kabupaten Banyumas cenderung lebih tinggi dari daerah lainnya di Wilayah Cibalingmas dan Provinsi Jawa Tengah, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional.

Penentuan isu strategis berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas melalui berbagai pertimbangan. Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Pemerintah yang diampu oleh Dinas Pendidikan, yakni **Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah**.

1. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2025 sebesar 13,53 Tahun yang mempunyai arti bahwa artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2025 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,53 Tahun atau setara dengan Diploma I. Capaian tersebut belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 13,05 Tahun pada Tahun 2026;
2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan langkah-langkah strategis dan taktis yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk mencapai target tersebut:

a. Akselerasi Pendidikan Kesetaraan (Non-Formal);

- 1) Intervensi pada jalur formal (SD/SMP) saja tidak cukup. Jalur Non-Formal menjadi kunci utama;
- 2) Program "Banyumas Pasti Sekolah": Pendataan intensif terhadap warga usia produktif yang putus sekolah (Drop Out) untuk ditarik kembali ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau SKB;
- 3) Optimalisasi Paket B dan Paket C: Memfasilitasi ujian kesetaraan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan level pendidikan mereka dari SD ke SMP (Paket B) atau SMP ke SMA (Paket C); dan

- 4) Kerjasama Lintas Sektor: Melibatkan Pemerintah Desa untuk menyisir warga yang belum lulus SMP/SMA melalui pemanfaatan Dana Desa untuk beasiswa pendidikan kesetaraan.

b. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

- 1) Mencegah penurunan angka RLS di masa depan dengan memastikan generasi saat ini tetap berada dalam sistem pendidikan;
- 2) Sistem Monitoring Real-Time: Menggunakan basis data pendidikan untuk melacak anak yang berisiko putus sekolah di tingkat SD dan SMP;
- 3) Satgas Penanganan ATS: Penguatan peran penilik dan pengawas sekolah dalam melakukan jemput bola kepada siswa yang tidak melanjutkan sekolah atau sering absen; dan
- 4) Beasiswa Afirmasi: Pemberian bantuan biaya pendidikan/perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga rentan miskin agar tidak terkendala faktor ekonomi melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Banyumas Pintar.

c. Digitalisasi dan Modernisasi Ekosistem Belajar.

- 1) Meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas pendidikan agar masyarakat lebih bersemangat menyelesaikan sekolah;
- 2) E-Learning dan Kelas Jauh: Pengembangan modul pembelajaran digital yang memungkinkan warga belajar (pada jalur kesetaraan) tetap bisa belajar di sela waktu bekerja; dan
- 3) Modernisasi Sarpras TIK: Melengkapi satuan pendidikan dengan perangkat teknologi untuk mendukung kualitas pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

d. Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko

- 1) Memastikan program peningkatan RLS berjalan efektif tanpa kebocoran anggaran atau hambatan administratif;
- 2) Sinkronisasi Data (Dapodik & Adminduk): Memastikan data penduduk yang sekolah tercatat dengan akurat sehingga penghitungan RLS oleh BPS mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya; dan
- 3) Risk Register Tahunan: Mengidentifikasi risiko seperti rendahnya minat belajar mandiri atau kurangnya tutor di PKBM, kemudian menyiapkan langkah pengendalian seperti pelatihan tutor dan kampanye pentingnya pendidikan.

e. Target Capaian Secara Teknis

- 1) Fokus Wilayah: Prioritas intervensi pada kecamatan-kecamatan dengan angka RLS terendah di Kabupaten Banyumas;

- 2) Kampanye Literasi Masyarakat: Mengubah mindset orang tua di wilayah Kabupaten Banyumas mengenai pentingnya pendidikan minimal 13 tahun (Wajar 13 Tahun).

BAB II. ●

Perencanaan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Visi dan Misi RPJPD Pemkab Banyumas Bidang Pendidikan

1. Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, sehingga diperlukan pemahaman mengenai Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005- 2025.

Visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005- 2025 adalah: BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI.

Banyumas adalah salah satu wilayah kabupaten di antara 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Tahun 2025 adalah angka tahun terakhir dari masa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah.

Di dalam huruf b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa: Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyebutkan bahwa: Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung-jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Bagi suatu lembaga, Negara yang salah satu unsurnya adalah kumpulan orang-orang yang bersatu sebagai suatu bangsa senantiasa akan terus hidup dan berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan kuantitas dan kualitas penduduk. Karenanya

pembangunan pembangunan sebagai suatu proses dilaksanakan terus berkelanjutan dan berkesinambungan tanpa henti sepanjang jaman atau dapat dikatakan bahwa pembangunan yang lestari. Dari hal-hal sebagaimana terurai di atas maka pelestarian pembangunan mengandung arti bahwa:

- a. Nilai-nilai harmonisasi hubungan antara manusia – masyarakat – alam sekitar – Tuhan YME tetap dipertahankan untuk menjaga keseimbangan alami;
- b. Pembangunan dilaksanakan terus menerus tanpa henti secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- c. Hasil pembangunan yang mempunyai nilai-nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat dipertahankan keberadaannya.

2. Misi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera**
Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).
- b. **Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri**
Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri
Mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.
- c. **Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing**

Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperan serta secara aktif di dunia internasional.

d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari dengan mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

e. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahap IV Tahun 2020-2024

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dibagi dalam 4 (empat) tahapan atau periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yakni: Tahap I tahun 2005–2009, Tahap II tahun 2010–2014, Tahap III tahun 2015–2019, dan Tahap IV tahun 2020–2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas didasarkan pada Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Tahap IV Tahun 2020-2024), dengan prioritas program sebagai berikut :

- 1) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera
 - (a) Kependudukan
 - (1) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kependudukan;
 - (2) Peningkatan pengaturan distribusi (insentif dan disinsentif) penduduk sesuai Perda Tata Ruang Wilayah;
 - (3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi program Keluarga Berencana.
 - (b) Pendidikan
 - (1) Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun;
 - (2) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;

- (3) Pengembangan kurikulum;
- (4) Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam pembangunan kualitas SDM.
- (c) Kesehatan
 - (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular;
 - (2) Peningkatan kualitas pelayanan Poliklinik Perdesaan;
 - (3) Peningkatan pelayanan bidan dan bidan desa secara menyeluruh;
 - (4) Peningkatan budaya hidup sehat masyarakat.
- (d) Ketenagakerjaan dan Pengangguran
 - (1) Peningkatan kualitas balai pelatihan kerja industri, jasa dan pertanian;
 - (2) Pengurangan pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri;
 - (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja.
- (e) Penanggulangan Kemiskinan
 - (1) Melanjutkan pelaksanaan program Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan;
 - (2) Melanjutkan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)
 - (3) Melanjutkan pengembangan jaringan kemitraan penanggulangan kemiskinan.
- (f) Pemberdayaan Perempuan
 - (1) Melanjutkan peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam segala kegiatan pembangunan.
- 2) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri
 - (a) Ekonomi
 - (1) Melanjutkan perkuatan operasional ekonomi kerakyatan
 - (2) Melanjutkan perkuatan manajemen lembaga ekonomi kerakyatan
 - (b) Perdagangan
 - (1) Melanjutkan pengembangan pusat-pusat perdagangan baik lokal maupun regional;
 - (2) Melanjutkan pengembangan jaringan distribusi wilayah;
 - (3) Melanjutkan peningkatan pelayanan pengembangan usaha distribusi baik lokal maupun regional.
 - (c) Pariwisata

- (1) Peningkatan pelayanan angkutan wisata ke obyek-obyek wisata;
 - (2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan obyek dan atraksi wisata;
 - (3) Pengembangan pengelolaan kawasan wisata Banyumas Selatan secara terpadu (wisata alam dan wisata budaya);
 - (4) Melanjutkan pengembangan Paket Wisata Regional;
 - (5) Melanjutkan peningkatan publikasi dan promosi wisata tingkat regional, nasional maupun internasional.
- (d) Pertanian
- (1) Peningkatan produktivitas perluasan daerah irigasi teknis;
 - (2) Melanjutkan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian lahan basah;
 - (3) Melanjutkan pengembangan kualitas produk agropolitan;
 - (4) Melanjutkan pengembangan manajemen agrowisata;
 - (5) Melanjutkan pengembangan agroindustri.
- (e) Industri
- (1) Melanjutkan pengembangan industri pengolahan produk pertanian;
 - (2) Melanjutkan pengembangan kuantitas dan kualitas produk industri rumah tangga.
- (f) Koperasi
- (1) Melanjutkan pengembangan koperasi produksi industri rumah tangga.
- (g) Pertambangan dan Energi
- (1) Melanjutkan pelayanan mekanisasi penambangan galian gol. C;
 - (2) Melanjutkan pengembangan listrik mikro hidro;
 - (3) Melanjutkan pengembangan bioenergi.
- 3) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing
- (a) Kependudukan
- (1) Melanjutkan pengembangan Manajemen Sistem Informasi kependudukan
- (b) Kualitas SDM
- (1) Melanjutkan peningkatan pelayanan dalam peningkatan pendidikan ke luar negeri;

- (2) Melanjutkan penguasaan teknologi informatika.
- (c) Politik, hukum dan pemerintahan
 - (1) Mempertahankan situasi politik yang kondusif;
 - (2) Peningkatan kualitas, fungsi dan peran Legislatif;
 - (3) Peningkatan pelaksanaan good governance;
- (d) Sarana dan Prasarana Wilayah
 - (1) Peningkatan kondisi jalur prasarana dan sarana transportasi ke pusat-pusat kegiatan masyarakat;
 - (2) Pembangunan jaringan prasarana dan sarana irigasi;
 - (3) Pengembangan pembangunan mikro hidro;
 - (4) Melanjutkan peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi.
- (e) Olahraga dan kebudayaan
 - (1) Melanjutkan peningkatan pelayanan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - (2) Melanjutkan peningkatan pelayanan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya khas Banyumas;
 - (3) Peningkatan pelayanan peran serta masyarakat dalam perlindungan benda cagar budaya.
- 4) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari
 - (a) Keberlanjutan pembangunan
 - (1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - (2) Penyusunan Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - (3) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya;
 - (4) Penetapan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya.
 - (b) Lingkungan hidup
 - (1) Melanjutkan antisipasi bencana alam di kawasan rawan bencana;
 - (2) Melanjutkan peningkatan pelayanan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - (3) Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan terasering di area belum terbangun;
 - (4) Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam penanaman pohon di area konservasi.

(c) Penataan ruang wilayah

- (1) Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
- (2) Melanjutkan evaluasi dan revisi perda tentang RDTR Kawasan Perkotaan secara periodik;
- (3) Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam penyusunan Neighbourhood Development.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Mendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas

1. Tugas Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi Dinas Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Pembinaan PAUD dan Dikmas.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Pembinaan PAUD dan Dikmas.
- 3) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Pembinaan PAUD dan Dikmas.
- 4) Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan dalam menjalankan Amanah Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 bertujuan untuk Meningkatnya Derajat Pendidikan dengan melaksanakan Misi: Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera di Bidang Pendidikan dalam rangka : a) Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; b) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; c) Pengembangan kurikulum; dan d) Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam pembangunan kualitas SDM.

Pelaksanaan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui Penyusunan Indikator, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam menjalankan 4 misi di Bidang Pendidikan yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

2.1.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Banyumas dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut dibawah ini.

Tabel. 2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	s.d 2026
Meningkatnya Derajat Pendidikan		Harapan Lama Sekolah	Banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia A pada tahun T dibagi jumlah penduduk yang bersekolah pada usia A pada tahun T Sumber data : formulasi : ... / ... X 100%	Tahun	12.8	12.88	12.89	13.05	13.05
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan (Sasaran)	APK PAUD	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	63.13	64	65	66	66
		APK SD sederajat	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	99.48	99.6	99.7	99.8	99.8
		APK SMP Sederajat	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	105.71	107	108	109	109

Tujuan	Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	s.d 2026
	Meningkatnya Mutu Hasil Belajar Siswa (Program)	APS 5-6 Tahun	APS 5-6 Tahun	%	68.72	100	100	100	100
		APS 7-15 Tahun	APS 7-15 Tahun	%	99.72	100	100	100	100
		APS 7-18 Tahun Kesetaraan	APS 7-18 Tahun Kesetaraan	%	NA	100	100	100	100
	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan yang bermutu (Program)	Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	%	85	90	91	92	92
	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah (Program)	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber:

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
2. E-Monev Dinas Pendidikan Tahun 2025 melalui aplikasi <http://103.105.190.121:81/emonev24/kinerjaopd/program>.

2.2. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment).

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 melalui PERBUP Banyumas Nomor 17 Tahun 2023, Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Selain itu, Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang telah di tandatangani antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas merupakan Perubahan Target dari Dokumen Renstra 2024-2026 disebabkan Target PK pada tahun sebelumnya telah tercapai melebihi Target yang telah ditetapkan seperti:

1. Angka Harapan lama Sekolah : Target tahun 2024 sebesar dan Realisasi tahun 2024 sebesar 13.34 Tahun, sehingga mempertahankan target lama

dalam Renstra untuk tahun-tahun berikutnya (2025-2026) akan membuat perencanaan menjadi tidak lagi objektif dan terlalu rendah (under-target).

2. APK PAUD. APK PAUD tidak disertakan dalam penghitungan pada BPS sehingga data APK PAUD mulai dari Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025 tidak tersedia.
3. APK SD Sederajat Target Tahun 2024 sebesar 99.6% dengan Realisasi sebesar 104.41% sehingga target lama perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan realisasi dan kesepakatan dengan Bappedalitbangda Kabupaten Banyumas.
4. APK SMP Sederajat dengan Target Tahun 2024 sebesar 107% dengan Realisasi sebesar 87,35%, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan realisasi dan kesepakatan dengan Bappedalitbangda Kabupaten Banyumas.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen operasional tahunan yang mengikat secara hukum antara Kepala Dinas dan Bupati. Ketika Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencantumkan angka yang lebih tinggi atau berbeda dari draf awal Renstra, maka secara otomatis PK tersebut berfungsi sebagai:

1. Instrumen Pengendali dengan memastikan kinerja Dinas Pendidikan terus meningkat; dan
2. Dasar Perubahan, ini menjadi alat bukti otentik untuk melakukan revisi dokumen Renstra di tengah periode berjalan agar terjadi keselarasan (alignment) antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen pelaksanaan tahunan.

Berdasarkan poin-poin penjelasan diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memerlukan Revisi atau Penyesuaian Target agar dokumen perencanaan tetap relevan dan menantang (stretching goals) yang disampaikan pada Perjanjian Kinerja baik Induk maupun Perubahan Tahun 2025.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 2.2.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan: Meningkatkan derajat Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13,55 Tahun
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan di Kabupaten Banyumas	APK PAUD	67%
		APK SD/MI	108,8%
		APK SMP/MTS	88,5%

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan pada bulan Januari 2025. Pada perjanjian kinerja tersebut menetapkan target kinerja yang akan dicapai yang di tandatangani antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan pada bulan Januari 2025 sesuai dengan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor DPA: DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 yang dapat dilihat pada Gambar berikut dibawah ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. JOKO WIYONO, M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.**
Jabatan : **Pj. Bupati Banyumas**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 2 Januari 2025


PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI BANYUMAS
IWANUDDIN ISKANDAR


PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Drs. JOKO WIYONO, M.Si.
NIP. 196602171993031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto 53141
☎ (0281) 636220, ☎ (0281) 630869
Email : dindik@banyumaskab.go.id Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
Tujuan: Meningkatnya Derajat Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.55	Formulasi: Banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia A pada tahun T dibagi jumlah penduduk yang bersekolah pada usia A pada tahun T Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data: Banyumas dalam angka dan BPS
Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan di Kabupaten Banyumas	APK PAUD	65%	Formulasi: Jumlah murid PAUD : Jumlah penduduk usia 0-6 tahun x 100% Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data: Banyumas dalam angka dan BPS, Profil Pendidikan dan Dapodik
	APK SMP Sederajat	108%	Formulasi: Jumlah murid SMP/ sederajat : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100% Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data: Banyumas dalam angka dan BPS, Profil Pendidikan dan Dapodik
	APK SD Sederajat	99.7%	Formulasi: Jumlah Murid SD/ sederajat : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100% Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data: Banyumas dalam angka dan BPS, Profil Pendidikan dan Dapodik



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto 53141
☎ (0281) 636220, ☎ (0281) 630869
Email : dindik@banyumaskab.go.id Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 275.562.363.098,00	APBD
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 29.400.000.000,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.088.403.914.360,09	APBD
JUMLAH		Rp 1.363.466.277.428,09	

Purwokerto, 2 Januari 2025


PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI BANYUMAS
IWANUDDIN ISKANDAR


PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Drs. JOKO WIYONO, M.Si.
NIP. 196602171993031002

Gambar 2. Perjanjian Kinerja (Induk) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 telah mengalami perubahan di akhir tahun 2025 dimana hal tersebut disebabkan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor DPPA: DPPA/A.3/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. JOKO WIYONO, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO, M.M.
Jabatan : Bupati Banyumas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, September 2025



SADEWO TRI LASTIONO



Drs. JOKO WIYONO, M.Si.
NIP. 196602171993031002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**
Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto 53141
☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869
Email : dindik@banyumaskab.go.id Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
Tujuan: Meningkatnya Derajat Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,55	Formulasi: Banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia A pada tahun T dibagi jumlah penduduk yang bersekolah pada usia A pada tahun T Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data: Banyumas dalam angka dan BPS
Sasaran : Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan di Kabupaten Banyumas	APK PAUD	67%	Formulasi: Jumlah murid PAUD : Jumlah penduduk usia 0-5 tahun x 100% Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data: Banyumas dalam angka dan BPS, Profil Pendidikan dan Dapodik
	APK SMP Sederajat	88,5%	Formulasi: Jumlah murid SMP/ sederajat : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100% Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data: Banyumas dalam angka dan BPS, Profil Pendidikan dan Dapodik
	APK SD Sederajat	108,8%	Formulasi: Jumlah Murid SD/ sederajat : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100% Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data: Banyumas dalam angka dari BPS, Profil Pendidikan dan Dapodik



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**
Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto 53141
☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869
Email : dindik@banyumaskab.go.id Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 279.138.119.509,00	APBD, DAK, DAU
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 29.147.000.000,00	APBD, DAK, DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 677.807.833.460,50	APBD, DAK, DAU
JUMLAH		Rp 1.286.092.952.969,50	

Purwokerto, September 2025



SADEWO TRI LASTIONO



Drs. JOKO WIYONO, M.Si.
NIP. 196602171993031002

Gambar 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

2.3. RENCANA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu organisasi.

Indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja yang baik memiliki 2 syarat: berorientasi hasil (outcome) dan SMART (Specific/jelas, tidak berdwimakna; Measureable/dapat diukur; Achievable/dapat diraih; Relevant/relevan dengan kinerja yang ingin diukur; Time Bound/memiliki batasan waktu pengukuran).

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas diwujudkan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas disusun dalam rangka mengukur realisasi dan rencana strategis. Pada Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 telah menetapkan target-target beserta anggaran di tahun 2025 untuk masing-masing Indikator Kinerja yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen rencana kerja organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahunan 2025. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 telah mengalami perubahan di akhir tahun 2025 dimana hal tersebut disebabkan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor DPPA: DPPA/A.3/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025. Adapun Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dapat disajikan pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.3. Rencana Anggaran Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Semula dan Sesudah) TA. 2025

No	Uraian	Sumber Dana	Pagu Anggaran Pelaksanaan Belanja Tahun 2025 (Semula) (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Sesudah) (Rp.)
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		1,393,466,277,428.09	1,321,121,001,966.91
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1,085,707,963,088.09	1,012,816,588,193.66
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,039,648,502.01	1,637,716,326.49
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DAK Non Fisik-tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik-TPG PNSD, Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,076,659,074,580.91	1,005,848,236,961.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,538,582,899.00	911,802,800.00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	367,147,000.00	367,147,000.00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,262,485,600.00	3,225,910,600.00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	841,024,506.17	825,774,506.17

No	Uraian		Sumber Dana	Pagu Anggaran Pelaksanaan Belanja Tahun 2025 (Semula) (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Sesudah) (Rp.)
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			275,662,363,068.00	277,303,819,509.00
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Daerah Provinsi, DAK Fisik-bidang Pendidikan-reguler-sd, DAK Non Fisik-bos Reguler, Dana Transfer Umum-dana Alokasi Umum, DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	144,755,845,255.00	145,255,908,994.00
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Daerah Provinsi, Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi, DAK Fisik-bidang Pendidikan-reguler-smp, DAK Non Fisik-bos Reguler, DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	97,346,612,926.00	97,768,232,378.00
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DAK Fisik-bidang Pendidikan-reguler-paud, DAK Non Fisik-bop Paud, DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26,774,327,936.00	27,813,575,936.00
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan, DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,785,576,951.00	6,466,102,201.00

No	Uraian		Sumber Dana	Pagu Anggaran Pelaksanaan Belanja Tahun 2025 (Semula) (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Sesudah) (Rp.)
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			29,400,000,000.00	29,147,000,000.00
	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dau Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29,400,000,000.00	29,147,000,000.00

Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui website: <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>.

BAB III.

Akuntabilitas Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen: a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025; b) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026; c) Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan.

Akuntabilitas kinerja dari suatu perangkat daerah adalah perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas akan disampaikan kepada Bupati Banyumas untuk dilaporkan menjadi Laporan Kinerja. Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Capaian kinerja akan dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode yang sama, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan melihat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan: Meningkatnya Derajat Pendidikan						
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.55	13,53	99,85	Belum Tercapai
Rata-Rata Capaian					99,85	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas melalui <https://banyumaskab.bps.go.id/>

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari tahun 2025. HLS Tahun 2025 adalah sebesar 13,53 tahun, artinya seorang anak yang pada saat ini berusia 7 tahun di Kabupaten Banyumas memiliki peluang atau diharapkan dapat mengenyam pendidikan selama 13,53 tahun di masa depan atau lulus Diploma I atau Diploma II. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja Terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja Terhadap Capaian Nasional
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,53	13,05	13,30	103,7%	101,7%

Pada Tahun 2025, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas sebesar 13,53 Tahun berada di peringkat pertama dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar (Cilacap, Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara) setelah Kabupaten Banyumas, adalah HLS Kabupaten Kebumen sebesar 13,42 Tahun dan berada di

atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah sebesar 13.05 Tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah Nasional sebesar 13.30 Tahun.

Pada dimensi pengetahuan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun pada tahun 2025 meningkat 101.4% dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2024, dari 13,34 tahun menjadi 13,53 tahun.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja menguraikan analisis tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026.

3.2.1. Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.

3.2.1.1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan *Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat* tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,53	99,85

Sumber: e-monev Kabupaten Banyumas dan Banyumas Dalam Angka 2026

Dalam melakukan pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Metode pengukuran yang digunakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 2025 yang digunakan adalah:

- 1) Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja;

- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran Indikator Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dibagi menjadi Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja menyesuaikan dengan Tujuan pencapaian yang telah ditetapkan yakni Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Indikator Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah. Indikator ini menunjukkan gambaran lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang

$$\text{Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)} = \frac{\text{Banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia A pada tahun T}}{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah pada usia A pada tahun T}}$$

ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Adapun formulasi penghitungan Indikator ini pada aplikasi e-monev Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan gambaran Banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia A pada tahun T dibagi jumlah penduduk yang bersekolah pada usia A pada tahun T, dengan rumusan penghitungan sebagai berikut:

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten yang bertujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2025 bersumber dari Data Badan Pusat Statistik Banyumas yang dipublish melalui <https://banyumaskab.bps.go.id/> dan Banyumas Dalam Angka yang dikeluarkan setiap tahunnya.

3.2.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. 2025 Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.3. sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	12,88	100,08
Tahun 2022				
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89	12,90	100,08
Tahun 2023				
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,91	13,26	102,71
Tahun 2024				
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26	13,34	100,60
Tahun 2025				
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,53	99,85

Sumber: e-monev Kabupaten Banyumas dan Banyumas Dalam Angka 2026

Sesuai dengan tabel capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 s.d. 2025 dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 s.d. 2025 dengan Kategori Tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Indikator Kinerja dari tujuan 1 yang ditetapkan yakni Angka Harapan Lama Sekolah yakni capaian pada Tahun Tahun 2021 s.d. 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan kisaran sebesar 0,01 pada tahun 2021 dan tahun 2022, Sedangkan capaian tertinggi Indikator Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 yang mana capaian meningkat 0,35 dari Tahun 2022. Untuk tahun 2024 capaian meningkat sebesar 0,08 dari target yang ditetapkan sebesar 13,26. Pada Tahun 2025 capaian Harapan Lama Sekolah sebesar 13,53 Tahun yang hanya mencapai 99.85% dari Target 13,55 Tahun.

Harapan lama sekolah dihitung menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional susenas Nasional (Susenas). Namun untuk penduduk yang tidak tercakup dalam susenas yaitu siswa yang bersekolah di pesantren maka dilakukan koreksi terhadap HLS. Diasumsikan bahwa peluang anak-anak usia sekolah di Kabupaten Banyumas tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

Berdasarkan data pada tahun 2025, Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 mencapai 13,53 Tahun yang berarti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang, dimana penduduk Kabupaten Banyumas baik laki-laki dan perempuan sebesar 13,53 Tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan minimal sampai dengan lulus SMA dan rata-rata telah mengenyam pendidikan tinggi Diploma I atau Diploma II atau minimal hingga semester 3 pada perguruan tinggi. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah di disebabkan Data perhitungan formulasi Angka Harapan Lama Sekolah masih menggunakan asumsi yang sama setiap tahunnya.

3.2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Pada Renstra.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,53	99,85	13,05	103,68

Sumber: e-monev Kabupaten Banyumas dan Banyumas Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra dapat dilihat bahwa Pengukuran angka harapan lama sekolah (expected years of schooling) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah

diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil realisasi dan target akhir, Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2025 telah melampaui Target Akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 103,68% dari target akhir Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026. Dimana digambarkan bahwa anak usia 7 (tujuh) tahun keatas di Kabupaten Banyumas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 13,53 tahun yakni lulus Diploma I atau Diploma II atau minimal mengikuti Pendidikan Tinggi sampai dengan Semester 4 di Perguruan Tinggi.

3.2.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Barlingmascakeb

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Kebumen	Kab. Cilacap
Angka Harapan Lama Sekolah	13,53	13,05	13,30	12,11	12,04	13,42	12,70

Sumber: e-monev Kabupaten Banyumas, Banyumas Dalam Angka 2026 dan Data BPS Provinsi Jateng.

Berdasarkan data diatas, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah sebesar 13,53 tahun, artinya anak usia 7 (tujuh) tahun keatas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 13 (tiga belas) tahun yakni lulus Diploma I atau Diploma II dengan minimal mengikuti Pendidikan Tinggi sampai dengan Semester 2 di Perguruan Tinggi. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebesar 13,53 Tahun lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,05 Tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah Nasional sebesar 13,30. Pada Tahun 2025, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas sebesar 13,53 Tahun dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar berada pada peringkat pertama.

3.2.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Kinerja, Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target Tujuan Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat sebagai amanah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melalui Angka Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada **Penyebab kegagalan dan solusi yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam pencapaian target** capaian Indikator Kinerja adalah:

1. Dinamika Peserta Didik. Adanya residu dampak ekonomi yang menyebabkan sebagian kecil anak usia sekolah lebih memilih bekerja atau membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Angka Putus Sekolah (Drop-out) di Transisi Jenjang. Terjadinya kebocoran jumlah siswa pada masa transisi, terutama dari tingkat SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK (meskipun SMA/SMK merupakan kewenangan Provinsi, inputnya sangat bergantung pada lulusan SMP di Kabupaten Banyumas);
3. Faktor Sosio-Kultural. Di beberapa wilayah kecamatan di Banyumas, masih terdapat pola pikir yang memprioritaskan bekerja di sektor informal atau pernikahan dini dibandingkan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi; dan
4. Migrasi Penduduk. Adanya Perpindahan penduduk usia sekolah keluar dari wilayah Kabupaten Banyumas yang tidak selalu dilaporkan secara real-time di Dapodik, sehingga mempengaruhi basis perhitungan angka harapan lama sekolah.

Untuk menekan gap antara target dan realisasi tersebut dan memastikan tren tetap positif, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah melakukan langkah-langkah strategis: Adapun solusi yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan diantaranya melalui:

1. **Program Intervensi Langsung**, melalui:
 - a. Optimalisasi Beasiswa (Trilas Bupati). Penyaluran bantuan bagi siswa berprestasi dan miskin (khususnya target 3.000 siswa SD dan 1.800 siswa SMP) guna meminimalisir risiko putus sekolah akibat biaya; dan
 - b. Program Pasti Sekolah. Melakukan penyisiran terhadap anak tidak sekolah (ATS) melalui kolaborasi dengan Pemerintah Desa untuk menarik mereka kembali ke jalur pendidikan formal maupun non-formal (Paket A, B, dan C).

2. **Peningkatan Akses dan Sarana**, melalui:
 - a. Rehabilitasi Gedung Sekolah. Melakukan perbaikan sarana prasarana (target 730 rehab) untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk tetap bersekolah;
 - b. Penyediaan Transportasi/Akses. Memberikan kemudahan akses bagi sekolah-sekolah di wilayah yang sulit dijangkau untuk memastikan kehadiran siswa terjaga.
3. **Strategi Digitalisasi dan Data**, melalui:
 - a. Penguatan Dapodik. Melakukan validasi data secara berkala untuk memastikan setiap siswa terdaftar secara akurat, sehingga angka HLS yang dihitung oleh BPS berdasarkan data lapangan sinkron dengan data administratif;
 - b. Modernisasi Ekosistem Belajar. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat sekolah lebih menarik bagi generasi Z dan Alpha, sehingga menekan angka kebosanan yang memicu putus sekolah.
4. **Koordinasi Lintas Sektoral**, melalui Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi. Koordinasi intensif terkait penyerapan lulusan SMP ke jenjang SMA/SMK agar tetap berada dalam sistem pendidikan, mengingat HLS menghitung ekspektasi lama sekolah dari umur 7 tahun ke atas.
5. **Perluasan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah**. Adanya kemudahan akses baik secara geografis maupun administratif bagi lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMA/SMK, serta meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi di wilayah Banyumas yang menarik minat lulusan menengah melalui:
 - a. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non-Formal. Optimalisasi Satuan Bakti Pendidikan: Mendorong peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM melalui program Kejar Paket untuk menarik kembali anak putus sekolah ke dalam sistem pendidikan;
 - b. Link and Match: Memperkuat kerja sama antara SMK dengan dunia industri untuk memastikan lulusan memiliki nilai tawar tinggi, yang secara tidak langsung memotivasi siswa untuk menyelesaikan sekolah.
6. **Membangun Modernisasi Ekosistem Belajar**. Membangun ekosistem belajar digital yang membuat proses pembelajaran lebih relevan dengan perkembangan zaman, sehingga mengurangi kebosanan siswa (demotivasi belajar).
7. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Pendidikan**. Kampanye berkelanjutan mengenai pentingnya pendidikan di atas 12 tahun mulai mengubah pola pikir masyarakat dari "cepat kerja" menjadi "sekolah tinggi untuk karier lebih baik, melalui:
 - a. Melakukan kampanye dan sosialisasi bagi orang-orang dewasa yang belum menamatkan pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau

bahkan pendidikan tinggi untuk kembali lagi masuk ke pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C;

- b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan PKBM untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan keaksaraan (memberantas buta aksara) khususnya bagi orang tua; dan
- c. Melakukan kerjasama antara Pemda Kabupaten Banyumas dengan pihak swasta dalam membangun kesepakatan mendukung perencanaan strategis pembangunan khususnya bidang pendidikan dengan ikut memberikan timbal balik berupa Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan seperti membangun sarana sekolah, pembiayaan bagi program Paket B, Paket C, beasiswa siswa kurang mampu dan lain-lain.

8. **Meningkatkan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan.** Adapun solusi yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui:

- a. Penghitungan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Banyumas serta ditindaklanjuti dengan mengusulkan melalui CPNS dan PPPK; dan
- b. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kurikulum.

3.2.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Selama Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1. **Efisiensi Alokasi Anggaran.** Tingkat realisasi HLS sebesar 99,85% dari target menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pendidikan telah mencapai titik efektivitas yang tinggi, melalui :
 - c. Efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja; dan
 - d. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran yang disajikan pada tabel 3.6 berikut dibawah.

Tabel 3.6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,085,707,963,088.09	1,012,816,588,193.66	72,891,374,894.43
2	Program Pengelolaan Pendidikan	275,662,363,068.00	277,303,819,509.00	(1,641,456,441.00)
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29,400,000,000.00	29,147,000,000.00	253,000,000.00
JUMLAH TOTAL		1,393,466,277,428.09	1,321,121,001,966.91	72,345,275,461.18

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan dalam penggunaan sumber daya pada Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 melalui 2 (dua) Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan besaran efisiensi sebesar Rp.72,891,374,894.43 dan Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan besaran efisiensi sebesar Rp.253,000,000.00 sehingga capaian efisiesni penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan/sasaran strategis indikator kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebesar 94.81%.

2. **Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM).** Sebagai instansi yang mengelola ribuan pendidik dan tenaga kependidikan, efisiensi SDM menjadi kunci, melalui:
 - a. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 - b. Rasio Guru dan Siswa: Efisiensi terlihat pada upaya pemerataan distribusi guru di wilayah Banyumas untuk menghindari penumpukan di area perkotaan (Purwokerto) dan kekurangan di area pinggiran;
 - c. Digitalisasi Administrasi: Penggunaan platform digital untuk urusan kenaikan pangkat, sertifikasi, dan pelaporan kinerja guru mengurangi beban administratif manual, sehingga guru dapat lebih fokus pada proses belajar mengajar di kelas.
3. **Efisiensi Sarana dan Prasarana,** melalui:
 - a. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;

- b. Mengurangi kebutuhan biaya bahan praktik fisik di sekolah-sekolah tertentu dengan menyediakan akses sumber daya digital yang dapat digunakan bersama secara daring; dan
- c. Sinkronisasi data antara Dapodik dengan database daerah mempercepat pengambilan keputusan, sehingga intervensi (seperti pemberian beasiswa) tidak mengalami salah sasaran (inklusivitas data).

Meskipun realisasi Kinerja sangat mendekati target, selisih 0,02 tahun menunjukkan adanya "biaya peluang" yang hilang, yakni:

1. Inefisiensi Transisi Jenjang: Masih adanya siswa yang tidak melanjutkan dari SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA/SMK atau ke Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa sumber daya yang telah diinvestasikan pada 9 tahun pertama belum sepenuhnya menghasilkan output maksimal di jenjang berikutnya; dan
2. Biaya Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS): Secara efisiensi, mencegah siswa putus sekolah jauh lebih murah dibandingkan melakukan program jemput bola atau pendidikan kesetaraan (Kejar Paket) di kemudian hari.

Adapun Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dari tujuan/sasaran strategis sudah dilakukan secara efisien. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memiliki hasil prosentase rata-rata capaian Indikator Kinerja sebesar 99,85%. Efisiensi ini capaian ini dipengaruhi dari komitmen pimpinan dan pelaksana teknis dalam menjalankan Program Strategis dan Arah Kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Banyumas melalui dukungan SDM dan Sarana prasarana Pendidikan dalam memberikan kontribusi dalam efisiensi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sendiri telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam meningkatkan efesiensi penggunaan sumberdaya di lingkungan Dinas Pendidikan, antara lain:

1. Komitmen dan tanggungjawab dari semua ASN yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berhasil melaksanakan efisiensi waktu dan tenaga dengan tertib dan disiplin waktu melaksanakan program dan kegiatan termasuk melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas (job description) yang telah disepakati sehingga tidak ada tumpang tindih tugas yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tentu saja anggaran;
2. Memaksimalkan peran serta Korwilcam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Pendidikan;
3. Memaksimalkan peran serta Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, sehingga bukan hanya memberdayakan fungsional pada tempatnya tetapi juga turut serta

memajukan kinerja organisasi dan memaksimalkan peningkatan realisasi anggaran yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

4. Sarana prasarana pendidikan yang terus ditingkatkan baik dalam kuantitas maupun kualitas terbukti memberikan nilai ungkit yang signifikan dalam pencapaian kinerja termasuk mengembangkan aplikasi yang menjamin pengelolaan data perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan data pendidikan dapat disajikan dengan lebih valid dan akurat. Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk identifikasi kebutuhan dan sasaran supaya tepat waktu, tepat guna dan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

3.2.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Tujuan Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat antara lain:

Tabel 3.7.

Target dan Realisasi Kinerja
di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	APK PAUD	67	72.87	108.76
		APK SD Sederajat	108.8	97	89.15
		APK SMP Sederajat	88.5	104.97	118.81

Sumber : Aplikasi e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Analisis pencapaian sasaran "Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan" di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2025 menunjukkan performa yang variatif. Terdapat keberhasilan signifikan pada jenjang SMP dan PAUD, namun terdapat tantangan pada jenjang SD yang memerlukan evaluasi mendalam. Sesuai Tabel diatas perhitungan Kinerja dari sasaran diatas adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) mulai dari tingkat Nasional sampai dengan Kabupaten Banyumas pada tahun 2024, Data BPS hanya menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/MTs dan Sekolah Menengah Atas/SMK/MA, sedangkan untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), APM dan APK tidak disertakan dalam penghitungan pada BPS sehingga data APK PAUD mulai dari Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025 tidak tersedia. Data APK PAUD yang tercatat diatas merupakan hasil pengolahan dan penghitungan sesuai formulasi APK PAUD oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Adapun analisis indikator kinerja dari sasaran "Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan" di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2025 sebagai berikut:

1. **APK SD Sederajat** (Target: 108,8% dengan Capaian: 97%), secara data, belum Mencapai Target (ada kesenjangan 11,8%), adapun Faktor Penyebab Kegagalan/Hambatan;
 - a. Target yang Terlalu Tinggi membuat kinerja belum tercapai;
 - b. Akurasi Data Mutasi. Adanya perpindahan penduduk (siswa) keluar daerah Kabupaten Banyumas yang belum sepenuhnya terhapus dari sistem Dapodik lokal, sehingga penyebut dalam rumus APK tetap tinggi sementara pembilangnya berkurang; dan
 - c. Efektivitas Program "Kembali ke Sekolah": Program penjangkauan anak putus sekolah di tingkat dasar mungkin belum menysasar kantong-kantong kemiskinan ekstrem secara presisi di tahun 2025.

Adapun Solusi/Tindakan Koreksi yang dapat dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah:

- a. Melakukan validasi data cleansing antara Dapodik dengan data kependudukan (Disdukcapil); dan
 - b. Revaluasi penetapan target pada dokumen perencanaan agar lebih realistis sesuai dengan tren demografi (penurunan angka kelahiran).
2. **APK SMP Sederajat** (Target: 88,5% dengan Capaian: 104,97%). Berdasarkan data diatas telah Melampaui Target. Adapun Faktor Penyebab Keberhasilan, antara lain:
 - a. Keberhasilan Program Transisi SD ke SMP. Program pendampingan kelulusan SD yang masif memastikan hampir seluruh lulusan melanjutkan ke SMP/MTs;
 - b. Migrasi Masuk. Angka di atas 100% menunjukkan bahwa SMP di Kabupaten Banyumas menjadi magnet bagi siswa dari luar kabupaten (perbatasan), yang menunjukkan kualitas mutu pendidikan SMP di Banyumas diakui lebih baik.

Akan tetapi, dalam mempertahankan capaian tersebut, diperlukan Strategi Pendukung, diantaranya:

- a. Penyediaan transportasi sekolah gratis atau subsidi di jalur-jalur rawan putus sekolah;
 - b. Digitalisasi ruang kelas yang membuat lingkungan belajar SMP lebih kompetitif;

- c. Daya Tarik Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap. Penguatan SMP Terbuka dan Sekolah Satu Atap (Satap) di wilayah geografis sulit di Banyumas bisa menarik anak-anak yang sebelumnya terkendala jarak.
3. **APK PAUD** (Target: 67% dengan Capaian: 72,87%) Berdasarkan data diatas telah Melampaui Target. Adapun Faktor Penyebab Keberhasilan, antara lain melalui Kesadaran Kolektif Orang Tua. Kampanye mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi karakter mulai diterima luas oleh masyarakat Banyumas.

Dalam rangka mempertahankan capaian tersebut, diperlukan Strategi Pendukung, diantaranya:

- Insentif Guru PAUD. Pemberian insentif atau peningkatan kesejahteraan bagi pendidik PAUD meningkatkan semangat pelayanan dan operasional lembaga PAUD di desa-desa.
- Program Satu Desa Satu PAUD, adanya Komitmen pemerintah daerah dalam memperluas layanan PAUD hingga ke tingkat desa/dusun; dan
- Integrasi PAUD dengan layanan kesehatan (Posyandu) yang memudahkan pemantauan anak usia dini secara menyeluruh.

Secara umum, akses pendidikan di Kabupaten Banyumas tahun 2025 telah menunjukkan tren ekspansi yang positif, terutama pada jenjang SMP dan PAUD. Kegagalan mencapai target pada APK SD bukan berarti penurunan jumlah siswa sekolah, melainkan lebih pada anomali penetapan target dan dinamika data kependudukan. Fokus ke depan adalah mempertahankan mutu pada jenjang yang sudah melampaui target dan melakukan efisiensi data pada jenjang pendidikan dasar.

3.2.2. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Akses Pendidikan dalam rangka mendukung melalui partisipasi anak dapat dilihat pada tabel 3.8. berikut dibawah ini:

3.2.2.1. Perbandingan antara Target Sasaran Tahun 2025 dengan Realisasi Sasaran Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	APK PAUD	67	72.87	108.76
		APK SD Sederajat	108.8	97	89.15
		APK SMP Sederajat	88.5	104.97	118.81

Sumber Data: 1) e-Monev Kabupaten Banyumas 2025; 2) e-RPD Tahun 2024-2026; 3) Banyumas dalam Angka 2026; dan 4) Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Berdasarkan tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujuan atau sasaran di Tahun 2024 termasuk beragam. Hal tersebut dapat dilihat dalam sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yaitu Meningkatnya Akses Mutu Pendidikan yang ditetapkan melalui penghitungan APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs.

Berdasarkan data e-monev Kabupaten Banyumas melalui, realisasi capaian APK SD/MI pada tahun 2025 tercatat sebesar 97% dan realisasi capaian APK SMP/MTs pada Tahun 2025 tercatat sebesar 104,97%. Sedangkan untuk APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2025, walaupun APK PAUD tidak disertakan dalam penghitungan pada BPS sehingga data APK PAUD mulai dari Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025 tidak tersedia. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melakukan pengolahan dan penghitungan sesuai formulasi APK PAUD sehingga capaian APK PAUD tahun 2025 tercatat capaian realisasi sebesar 72,87%.

3.2.2.2. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Sasaran Tahun 2022 s.d. Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Sasaran Tahun 2022 s.d. Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah suatu perbandingan selama periode 2022 s.d. 2025.

Dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berhasil mengubah tantangan menjadi peluang melalui Digitalisasi Ekosistem Belajar. Kegagalan tipis pada beberapa desimal angka pada capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas lebih disebabkan oleh faktor eksternal (data kependudukan dan kebijakan rekrutmen pusat) daripada kelemahan manajerial internal. Secara keseluruhan, derajat pendidikan masyarakat Banyumas terus meningkat secara signifikan.

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Sasaran
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi
Tahun 2022		
APK PAUD	%	108,61
APK SD/Mi	%	108,48
APK SMP/MTS	%	81,22
Tahun 2023		
APK PAUD	%	78
APK SD/Mi	%	108,70
APK SMP/MTS	%	86,37

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi
Tahun 2024		
APK PAUD	%	76,63
APK SD/Mi	%	104,41
APK SMP/MTS	%	87,35
Tahun 2025		
APK PAUD	%	72.87
APK SD/Mi	%	97
APK SMP/MTS	%	104.97

Sumber Data: 1) e-Monev Kabupaten Banyumas 2025; dan 2) Banyumas dalam Angka 2026;

Berdasarkan tabel diatas, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Banyumas untuk tahun 2021, 2023 dan 2024 tidak tersedia karena tidak ada data pada Badan Pusat Statistik yang menyebutkan angka tersebut. APK PAUD tidak disertakan dalam penghitungan pada BPS di Kabupaten Banyumas mulai Tahun 2023 s.d. 2025 tidak tersedia. Walaupun tidak ada penghitungan APK PAUD oleh BPS, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melakukan pengolahan dan penghitungan sesuai formulasi APK PAUD sehingga capaian APK PAUD tahun 2025 tercatat sebesar 72,87%. Dimana berdasarkan capaian tahun 2025 APK PAUD Tahun 2025 mengalami penurunan 3.76 poin dibandingkan capaian APK PAUD pada tahun 2024. Berdasarkan Tabel diatas, Tren Peningkatan APK PAUD tahun 2024 dengan capaian sebesar 76.63% dibandingkan Tahun 2023 dengan capaian 64.91%, akan tetapi APK PAUD Tahun 2025 dengan capaian 73.74% lebih rendah dibandingkan capaian 2024, ini disebabkan masih terdapat kesenjangan kualitas antara PAUD di perkotaan dan pedesaan, keterjangkauan biaya, dan kesadaran masyarakat.

Dari data diatas, terlihat APK SD/Mi mengalami peningkatan paling signifikan pada Tahun 2023 yakni pada angka 108,70%, sedangkan APK SMP/MTS secara konsisten mulai tahun 2024 mengalami peningkatan walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan capaian sasaran 1 “Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan” pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar warga Kabupaten Banyumas telah mementingkan pendidikan putra-putrinya, sekalipun tidak semua warga Masyarakat Kabupaten Banyumas tersebut menyekolahkan putra-putrinya di sekolah atau madrasah di lingkungan Kabupaten Banyumas.

3.2.2.3. Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2025 Dengan Target Akhir Pada Renstra.

Perbandingan realisasi sasaran dari tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Sasaran Tahun 2025 dengan Target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Sasaran Renstra s.d th 2025 (%)
		Target	Realisasi	%		
APK PAUD	%	67	72.87	108,76	66	110,41
APK SD/Mi	%	108.8	97	89.15	99,8	97,19
APK SMP/MTs	%	88.5	104.97	118,61	109	96,3

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Sesuai dengan hasil pada Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 terhadap Target Renstra, dilihat melalui 3 (tiga) indikator sasaran yang sesuai dengan target akhir yang ditetapkan yakni Indikator Sasaran APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs pada Tahun 2025 yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD terhadap Target Renstra di Kabupaten Banyumas tidak disertakan dalam penghitungan pada BPS di Kabupaten Banyumas mulai Tahun 2023 s.d. 2024 tidak tersedia. Walaupun tidak ada penghitungan APK PAUD oleh BPS, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melakukan pengolahan dan penghitungan sesuai formulasi APK PAUD sehingga capaian APK PAUD tahun 2025 tercatat sebesar 72,87%. Dimana berdasarkan capaian tahun 2025 APK PAUD Tahun 2025 mengalami peningkatan kemajuan realisasi capaian sebesar 110,41% dari perbandingan Target Akhir Renstra 2024-2026 yang tercatat sebesar 66%;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI terdapat Target Renstra dan capaian Persentase Sasaran di Akhir Tahun Renstra 2026 terdapat penurunan kemajuan realisasi capaian sebesar 97% dengan persentase sasaran sebesar 97,19% dari perbandingan Target Akhir Renstra 2024-2026 yang tercatat sebesar 99,8%. Secara operasional, Dinas Pendidikan telah berhasil mempertahankan akses pendidikan dasar bagi mayoritas masyarakat. Hasil ini disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tidak mencapai target renstra yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya: a) Penurunan ini menjadi sinyal penting untuk melakukan cleansing data peserta didik di akhir tahun Renstra 2026 guna memastikan apakah penurunan disebabkan

oleh anak yang tidak sekolah atau murni karena pergeseran jumlah penduduk (faktor demografis); b) Penurunan APK seringkali dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk usia 7-15 tahun. Jika jumlah anak usia tersebut berkurang namun kapasitas sekolah tetap, angka APK secara otomatis akan terkoreksi mengikuti data kependudukan riil. Sehingga pada tahun-tahun mendatang diperlukan fokus kebijakan di tahun terakhir harus diarahkan pada penyisiran anak tidak sekolah (ATS) di kantong-kantong wilayah tertentu agar realisasi 97% dapat ditingkatkan mendekati target akhir.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Kabupaten Banyumas tahun 2025 tercatat sebesar 104,97%. Sehingga APK SMP/MTs tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Target Renstra Tahun 2026 baru mencapai 96.30%. Hasil ini disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP tidak mencapai target resntra yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya: (a) Faktor pendidikan orang dewasa, seperti melek huruf laki-laki; (b) Faktor ekonomi, seperti pengeluaran untuk pendidikan; (c) Faktor guru, seperti rasio murid terhadap guru; dan (d) Faktor jumlah sekolah, seperti rasio murid terhadap sekolah.

3.2.2.4. Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2025 Dengan Standar Nasional Dan Provinsi Dan Kabupaten Sekitar (Barlingmascakeb)

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Dengan Standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Barlingmascakeb

Indikator Sasaran	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga Tahun 2024	Kab. Banjarnegara Tahun 2024	Kab. Kebumen
APK PAUD	72.87	36,19	48,61	N/A	N/A	N/A
APK SD/Mi	97	107,00	103,65	N/A	102	N/A
APK SMP/MTs	104.97	93,02	91,73	N/A	92	N/A

Sumber: 1) e-monev Kabupaten Banyumas 2025; 2) Banyumas Dalam Angka 2026; dan 3) Data BPS Provinsi Jateng.

Berdasarkan data pada tabel 3.11. Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan standar Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitar dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator sasaran yang sesuai dengan target akhir yang ditetapkan yakni Indikator Sasaran APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs pada Tahun 2024, dimana perbandingan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Banyumas dan seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah belum tersedia sehingga tidak dapat melakukan perbandingan terdapat realisasi capaian dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Walaupun tidak ada penghitungan APK PAUD oleh BPS, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melakukan pengolahan dan

penghitungan sesuai formulasi APK PAUD sehingga capaian APK PAUD tahun 2025 tercatat sebesar 72,87%, dimana capaian tersebut masih lebih tinggi capaian sebesar 36,88 poin dibandingkan capaian Nasional yang tercatat 36,19% dan capaian APK PAUD Kabupaten Banyumas juga lebih tinggi Capaian Provinsi Jawa Tengah 24,26 poin dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah yang tercatat 48,61%;

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Banyumas tahun 2025 tercatat 97%. APK SD/MI di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 masih lebih rendah capaian sebesar 6.65 poin dibandingkan dengan capaian pada Provinsi Jawa Tengah yang tercatat 103,65%. Apabila dibandingkan dengan Nasional, APK SD/MI Kabupaten Banyumas Tahun 2024 masih lebih rendah 10 poin dibawah capaian APK SD/MI di Nasional yang tercatat sebesar 107%. Sedangkan APK SD/MI Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar berada pada peringkat kedua dikarenakan beberapa Kabupaten Sekitar belum menyediakan Data APK SD/MI tahun 2025, hanya Kabupaten banjarnegara yang telah merilis Data APK SD/MI tahun 2025 sebesar 102% dan capaian itu masih diatas APK SD/MI Kabupaten Banyumas sebesar 5 poin.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Kabupaten Banyumas tercatat 104,97%. APK SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2025 lebih tinggi capaian sebesar 13,24 poin dibandingkan dengan capaian pada Provinsi Jawa Tengah yang tercatat 91,73% dan masih lebih tinggi 11,95 poin diatas capaian APK SMP/MTS Nasional yang tercatat sebesar 93,02%. Sedangkan APK SMP/MTs Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar berada pada peringkat pertama dikarenakan beberapa Kabupaten Sekitar belum menyediakan Data APK SMP/MTs tahun 2025, hanya Kabupaten Banjarnegara yang telah merilis Data APK SMP/MTs tahun 2025 sebesar 92% dan capaian itu masih dibawah APK SMP/MTs Kabupaten Banyumas sebesar 12,97 Poin. Capaian tersebut dikarenakan masih banyaknya data anak yang tidak sekolah pada jenjang SMP/MTs sehingga diperlukan beberapa cara dalam mengantisipasi permasalahan yang ada yakni melalui pendataan pada tahun 2025 terkait anak tidak sekolah maupun solusi permasalahan yang ada dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs.

3.2.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target Sasaran, Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yakni

Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan yang ditetapkan **melalui penghitungan APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs.**

Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan/hambatan berdasarkan kinerja melalui penghitungan APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs tersebut:

1. Analisis APK SD/MI (Target: 108.8% dan Realisasi: 97%), adappun factor penyebab kegagalan berdasarkan kinerja, adalah sebagai berikut;
 - a. Terdapat anomali Data Demografi. Angka 97% seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jumlah anak usia 7-15 tahun di basis data kependudukan dengan jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik. Hal ini bisa terjadi karena adanya perpindahan penduduk keluar daerah yang tidak dilaporkan;
 - b. Transisi Sistem Pendataan: Adanya "residu" data atau keterlambatan sinkronisasi antara sekolah di bawah naungan Kemendikbudristek (SD) dan Kemenag (MI) dalam sistem BPS; dan
 - c. Faktor Ekonomi Lokal. Meskipun kecil, masih terdapat kantong-kantong wilayah di mana anak usia SD terpaksa membantu keluarga atau mengalami kendala akses karena kondisi geografis tertentu di pelosok Banyumas.
2. Analisis APK SMP/MTs (Target: 88.5% dan Realisasi: 104,97%). Faktor Penyebab Keberhasilan, antara lain:
 - a. Daya Tarik Pendidikan Daerah. Angka capaian di atas 100% membuktikan bahwa Kabupaten Banyumas merupakan magnet pendidikan. Banyak siswa dari luar kabupaten (perbatasan) yang bersekolah di SMP/MTs wilayah Banyumas;
 - b. Efektivitas Program Wajib Belajar. Kesuksesan program transisi dari SD ke SMP yang memastikan hampir tidak ada lulusan SD yang tercecer, ditambah dengan keberhasilan menarik anak-anak di luar usia standar (lebih tua) untuk kembali sekolah melalui jalur formal maupun terbuka; dan
 - c. Kualitas Sarana Prasarana. Kondisi sekolah menengah di Banyumas yang relatif lebih baik dan lengkap menarik minat partisipasi masyarakat secara luas.
3. Analisis APK PAUD (Target: 67 dan Realisasi: 72,87%). Faktor Penyebab Keberhasilan, antara lain:
 - a. Inisiatif Perhitungan Mandiri. Dikarenakan data BPS tidak tersedia, inisiatif Dinas Pendidikan melakukan formulasi mandiri menunjukkan tata kelola data yang proaktif. Capaian 100,76% menandakan layanan PAUD sudah menjangkau seluruh target sasaran anak usia dini di Banyumas;
 - b. Gerakan PAUD Berkualitas. Keberhasilan program "Satu Desa Satu PAUD" dan integrasi layanan PAUD dengan Posyandu di tingkat desa yang

meningkatkan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak sejak dini; dan

- c. Dukungan Pemerintah Desa, Dimana pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung sarana prasarana PAUD sangat membantu pencapaian angka partisipasi ini.

3.2.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2025 telah melakukan berbagai upaya efisiensi terutama dalam mendukung pencapaian sasaran 1: yakni Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan, antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;
3. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja; dan
4. Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran yang disajikan pada tabel 3.12. berikut :

Tabel 3.12. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan			
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	26,774,327,936.00	27,813,575,936.00	(1,039,248,000.00)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	144,755,845,255.00	145,255,908,994.00	(500,063,739.00)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	97,346,612,926.00	97,768,232,378.00	(421,619,452.00)
	Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan	6,785,576,951.00	6,466,102,201.00	319,474,750.00

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29,400,000,000.00	29,147,000,000.00	253,000,000.00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,085,707,963,088.09	1,012,816,588,193.66	72,891,374,894.43
JUMLAH TOTAL		1,393,466,277,428.09	1,321,121,001,966.91	72,345,275,461.18

Sumber: 1) <https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan>; dan 2) Renja Perubahan Tahun 2025.

Keberhasilan ini merupakan wujud dari komitmen pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran 1: yakni Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan melalui:

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan Indikator Kinerja yakni Meningkatnya Mutu Hasil Belajar Siswa melalui penghitungan APS 5-6 Tahun, APS 7-15 Tahun dan APS 7-18 Tahun Kesetaraan.
anggaran yang digunakan DPA Induk sebesar Rp.275,662,363,068.00 dan pada anggaran akhir setelah Perubahan Anggaran tercatat alokasi anggaran Program ini sebesar Rp.277,303,819,509.00 dan selisih diantara Pagu Induk dan Perubahan tercatat sebesar Rp.1,641,456,441.00. Program Pengelolaan Pendidik dengan realisasi anggaran yang digunakan tahun 2025 untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.275,748,689,021.00 atau tercapai sebesar 98,79% dari target anggaran perubahan tahun 2025.
2. Program Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Pemerataan Pendidikan yang bermutu melalui Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi, anggaran yang digunakan DPA Induk sebesar Rp.29,400,000,000.00 dan pada anggaran akhir setelah Perubahan Anggaran tercatat alokasi anggaran Program ini sebesar Rp.29,147,000,000.00 dan selisih diantara Pagu Induk dan Perubahan tercatat sebesar Rp.253,000,000.00. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan realisasi anggaran yang digunakan tahun 2025 untuk mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.27,338,326,977.00 atau tercapai sebesar 93,71% dari target anggaran perubahan tahun 2025.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja yakni Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah melalui Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah. Pagu Anggaran Induk sebesar Rp.1,085,707,963,088.09. Pada anggaran perubahan, alokasi anggaran tersebut menjadi sebesar Rp. 1,012,816,588,193.66 sehingga terjadi selisih/efisiensi antara Pagu Induk dan Perubahan tercatat sebesar Rp.72,891,374,894.43. Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran di atas yaitu sebesar

Rp.948,137,116,124.00 atau tercapai sebesar 96,97% dari target anggaran tahun 2025.

3.2.2.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Sasaran Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melalui program/kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini:

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan Indikator Kinerja yakni Meningkatnya Mutu Hasil Belajar Siswa melalui penghitungan APS 5-6 Tahun, APS 7-15 Tahun dan APS 7-18 Tahun Kesetaraan;
2. Program Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Pemerataan Pendidikan yang bermutu melalui Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja yakni Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah melalui Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah.

Tabel 3.13. Perbandingan Antara Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Capaian Program/Kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realiasi	Prosentase (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	
						Keu	Fisik
1	Program Pengelolaan Pendidikan						
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APS 5-6 Tahun	100	80.10	80.10	97,08	96,93
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APS 7-15 Tahun	100	N/A	N/A	98,93	99,62
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APS 7-18 Tahun Kesetaraan	100	N/A	N/A	99,17	99,25
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi	91	82.2	90.33	93,79	99,91
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	100	100	96,79	96,66

Sumber : Aplikasi e-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2025

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan Indikator Kinerja yakni Meningkatnya Mutu Hasil Belajar Siswa melalui penghitungan APS 5-6 Tahun,

dimana dimaksudkan pada Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan penggunaan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.28,135,575,936.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.27,312,981,757.00 dengan tingkat capaian sebesar 97,08%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun. Angka Partisipasi Sekolah capaian tahun 2025 pada Jenis Kelompok Umur 5-6 Tahun di Kabupaten Banyumas tercatat 82,40% yang merupakan hasil pengolahan dan penghitungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun di Kabupaten Banyumas lebih tinggi sebesar 11,85 poin dibandingkan APS nasional yang tercatat 70,55%, serta lebih tinggi sebesar 4,43 poin dibandingkan APS Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 77,97%.

Penyebab Keberhasilan Peningkatan Capaian APS Usia 5–6 Tahun di Kabupaten Banyumas, banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. Ketersediaan dan akses layanan PAUD/TK yang semakin luas, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat; 3) Dukungan program pemerintah daerah dalam penguatan pendidikan anak usia dini, seperti pembinaan lembaga PAUD dan peningkatan kualitas layanan;
- c. Peran aktif orang tua dan masyarakat dalam mendorong anak mengikuti pendidikan pada usia dini; dan 5) Adanya program bantuan pendidikan atau stimulasi pendidikan yang membantu meringankan biaya pendidikan bagi keluarga di Kabupaten Banyumas berupa Bantuan Sosial Biaya Personil Peserta Didik dan Bantuan Perlengkapan Peserta Didik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian APS kelompok umur 5–6 tahun di Kabupaten Banyumas, beberapa langkah yang dapat dilakukan ke depan antara lain:

- a. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan PAUD, terutama di wilayah yang tingkat partisipasinya masih rendah;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD, melalui peningkatan kompetensi pendidik dan penyediaan sarana prasarana yang memadai;
- c. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini;
- d. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pengembangan layanan PAUD; dan
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat partisipasi sekolah untuk memastikan keberlanjutan peningkatan APS.

2. APS 7-15 Tahun. APS 7-15 tahun ini dikelola oleh Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang terdiri dari:
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan alokasi pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp.146,076,658,994.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.144,794,288,353.00 dengan tingkat capaian sebesar 99.12%;
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.98,337,782,378.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97,107,987,337.00 dengan tingkat capaian sebesar 98,75%;

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun. Angka Partisipasi Sekolah capaian tahun 2025 pada Jenis Kelompok Umur 7-15 Tahun di Kabupaten Banyumas masih belum dikeluarkan atau belum diterbitkan melalui Rapor Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025, Meskipun data resmi Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun untuk capaian 2025 di Kabupaten Banyumas belum diterbitkan, tren historis menunjukkan angka yang sangat stabil di angka tinggi (biasanya di atas 99%). Kondisi ini mencerminkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Banyumas sudah terserap ke dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal.

Faktor Penyebab Keberhasilan dalam rangka peningkatan capaian APS 7-15 tahun pada tahun 2024-2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Implementasi program wajib belajar pendidikan dasar, yang mendorong seluruh anak usia sekolah dasar untuk mengikuti pendidikan formal;
- b. Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan: Sebaran sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di Banyumas sangat merata hingga ke tingkat desa/pelosok, sehingga akses fisik bukan lagi menjadi kendala utama sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan;
- c. Program Intervensi Biaya Pendidikan melalui Dukungan program bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang membantu mengurangi beban biaya Pendidikan;
- d. Kesadaran Masyarakat yang Tinggi di Masyarakat Banyumas yang memiliki budaya literasi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi masa depan anak yang cukup kuat; dan
- e. Sinergi Lintas Sektor: Kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan anak usia sekolah memastikan tidak ada anak yang "tercecer" dari sistem.

Rencana Tindak Lanjut meningkatkan Kinerja Capaian APS 7-15 Tahun di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan beberapa langkah strategis:

- a. Optimalisasi Program SIPATAS. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah meluncurkan program SIPATAS (Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah). Rencana tindak lanjutnya meliputi: a) Validasi Data By Name By Address: Melakukan pemetaan detail terhadap anak-anak yang berisiko putus sekolah agar intervensi tepat sasaran; dan b) Gerakan Kolektif: Melibatkan tokoh masyarakat dan anggota DPRD di tiap dapil untuk memantau keberlanjutan sekolah anak-anak di lingkungan mereka;
 - b. Transformasi Pendidikan Digital dan Mutu. Mempertahankan APS bukan hanya soal jumlah anak di sekolah, tapi juga kualitas pembelajarannya agar anak betah di sekolah;\
 - c. Implementasi Kurikulum pada pembelajaran dengan melakukan kerja sama dengan BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan relevan;
 - d. Peningkatan Sarana Prasarana: Renovasi ruang kelas rusak secara berkala melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lingkungan belajar tetap aman dan nyaman; dan
 - e. Monitoring Melalui Evaluasi Sistematis. Menggunakan platform seperti Raport Pendidikan untuk memantau indikator iklim keamanan sekolah dan inklusivitas, guna mencegah faktor non-ekonomi seperti bullying yang bisa menyebabkan anak enggan bersekolah.
3. APS 7-18 Tahun Kesetaraan. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan penggunaan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.6,588,102,201.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6,533,431,574,- dengan tingkat capaian sebesar 99,17%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan. Untuk Angka Partisipasi Sekolah pada Jenis Kelompok Umur 7-18 Tahun di Kabupaten Banyumas masih belum dikeluarkan atau belum diterbitkan melalui Raport Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Tingkat Nasional sebesar 96,17% dan Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,12% yang diterbitkan melalui BPS di tahun 2025.

Penyebab kegagalan dalam meningkatkan Kinerja capai APS 7-18 Tahun Kesetaraan di Kabupaten Banyumas adalah melalui Penguatan Jalur Pendidikan Non-Formal. Bagi anak-anak yang memiliki kendala khusus (seperti membantu ekonomi keluarga atau kondisi geografis ekstrem),

penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan LKP menjadi solusi agar mereka tetap terhitung dalam APS melalui program Kesetaraan Paket A; Adapun rencana Tindak Lanjut dalam meningkatkan Kinerja capai APS 7-18 Tahun Kesetaraan di Kabupaten Banyumas dengan melakukan Langkah strategis melalui Optimalisasi Program SIPATAS. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah meluncurkan program SIPATAS (Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah), meliputi:

- a. Validasi Data By Name By Address: Melakukan pemetaan detail terhadap anak-anak yang berisiko putus sekolah agar intervensi tepat sasaran; dan
 - b. Gerakan Kolektif: Melibatkan tokoh masyarakat dan anggota DPRD di tiap dapil untuk memantau keberlanjutan sekolah anak-anak di lingkungan mereka.
4. Program Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Pemerataan Pendidikan yang bermutu melalui Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi, yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.28,205,422,500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.26,934,739,880,- dengan tingkat capaian sebesar 97,55%.

Indikator Kinerja Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi hanya dapat dicapai sebesar 82,2% pada Tahun 2025 dikarenakan persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan masih dipengaruhi oleh Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Kabupaten dan juga dikarenakan banyaknya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Pensiun.

Secara statistik, meskipun angka realisasi berada di bawah target, tingkat capaian kinerja terhadap target sudah berada di angka 90,35% (Kategori Tinggi/Baik), namun belum mencapai kategori Sangat Tinggi karena belum menembus angka 91%. Capaian 82,22% menunjukkan bahwa upaya pemerataan tenaga pendidik di Banyumas sudah berada pada jalur yang benar, namun terhambat oleh kebijakan rekrutmen nasional dan dinamika pensiun.

Adapun Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target dengan Kesenjangan sebesar 8,60% ini umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Laju Pensiun dibandingkan dengan Rekrutmen. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memasuki masa purna tugas (pensiun) setiap bulannya di Kabupaten Banyumas seringkali lebih cepat dibandingkan dengan siklus pengadaan ASN (CPNS/PPPK) dari Pemerintah Pusat maupun Kabupaten Banyumas;

- b. Keterbatasan Formasi. Dinas Pendidikan mengajukan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja, namun penetapan kuota formasi akhir berada di tangan Kemenpan-RB dan BKN, yang seringkali disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah;
- c. Distribusi Geografis. Masih terdapat kendala dalam pemerataan penempatan. Beberapa formasi di wilayah pinggiran Kabupaten Banyumas terkadang kurang diminati atau mengalami kekosongan pelamar pada saat proses seleksi; dan
- d. Persyaratan Kualifikasi. Adanya syarat sertifikasi atau kualifikasi linier yang ketat menyebabkan beberapa formasi tenaga kependidikan (seperti tenaga administrasi atau pustakawan) sulit terisi oleh kandidat yang memenuhi kriteria.

Untuk menutup celah 8,60% tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Redistribusi Guru (Penataan). Melakukan pemetaan ulang dan mutasi secara proporsional dari sekolah yang kelebihan beban guru ke sekolah yang mengalami kekurangan kritis;
 - b. Pengusulan Formasi PPPK Berkelanjutan. Memperkuat basis data analisis kebutuhan guru (Anjab/ABK) agar usulan formasi ke pemerintah pusat di tahun berikutnya memiliki argumen data yang kuat;
 - c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ada. Mengoptimalkan tenaga kependidikan yang ada melalui pelatihan multi-skilling agar dapat menjalankan fungsi yang kosong secara efektif untuk sementara waktu; dan
 - d. Digitalisasi Administrasi. Mempercepat implementasi sistem informasi manajemen sekolah untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga administrasi manual.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja yakni Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah melalui Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah terdiri atas 6 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.977,807,833,461.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.948,137,116,124.00 dengan tingkat capaian sebesar 96,97% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian 100% pada indikator ini menunjukkan bahwa mekanisme internal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 bekerja dengan sangat efisien. Fokus untuk periode berikutnya adalah mempertahankan konsistensi ini (sustainability) sambil terus mencari celah untuk melakukan inovasi digital guna meningkatkan kecepatan layanan penunjang tersebut.

Keberhasilan mencapai angka mutlak 100% ini didorong oleh beberapa faktor manajerial:

- a. Perencanaan Anggaran yang Presisi. Alokasi anggaran untuk layanan penunjang (seperti gaji, listrik, internet, pemeliharaan kantor, dan alat tulis kantor) telah disusun dengan akurasi tinggi sehingga tidak terjadi kekurangan dana di tengah tahun anggaran;
- b. Kedisiplinan Administrasi. Tim operasional internal (Sekretariat) menjalankan fungsi dukungan secara konsisten, memastikan setiap kebutuhan operasional dinas terpenuhi tepat waktu untuk mendukung kegiatan teknis Pendidikan;
- c. Kepatuhan terhadap SOP. Pelaksanaan layanan penunjang mengikuti Standar Operasional Prosedur yang ketat, mulai dari proses pengadaan hingga pemanfaatan aset daerah; dan
- d. Sistem Monitoring Internal. Adanya pengawasan rutin terhadap realisasi belanja penunjang sehingga potensi hambatan dapat dimitigasi sebelum berdampak pada capaian akhir tahun.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari adanya anggaran sebagai motor penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan dalam rangka melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan data dari laporan aplikasi e-monev dan Jegos Kabupaten Banyumas tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah melaksanakan kegiatan pada Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan Nomor DPA: DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025. Adapun ketersediaan anggaran yang disediakan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang semula sebesar Rp.1,393,466,277,428.09 pada pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Nomor DPPA: DPPA/A.3/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 menjadi sebesar Rp.1,321,121,001,966.91 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Seribu Sembilan Ratus Enam Ratus Enam Puluh Enam Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai keseluruhan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mengalami perubahan alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, perubahan tersebut disebabkan adanya penambahan anggaran dan realokasi anggaran sebesar dikarenakan adanya kebutuhan organisasi serta arahan dan kebijakan strategis baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang teralokasikan di perubahan di alokasi anggaran Program Penunjang alokasi anggaran pada Program Pengelolaan Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada akhir Tahun 2025 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.1,251,224,132,122.00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Dua*) yang mana capaian realisasi alokasi anggaran tersebut belum termasuk Realisasi yang pencairan tidak melalui SIPD Penatausahaan yaitu BOS SD, BOS SMP, BOP PAUD, BOP Kesetaraan dan TPG, sehingga persentase capaian realisasi keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah sebesar 94,71%.

Angka ini di dinilai Tinggi, akan tetapi dapat dipertahankan pada tahun berikutnya, malah dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan tahun berikutnya, berdasarkan capaian realisasi tersebut terdapat ketidakefisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai keseluruhan tujuan dan sasaran tersebut. Walaupun komitmen pimpinan dan pelaksana teknis dalam menjalankan Program Strategis dan Arah Kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau bagi Masyarakat Kabupaten Banyumas tinggi, kedepan dalam peningkatan efisiensi anggaran pada tahun-tahun mendatang bisa mempersiapkan kejadian-kejadian luar biasa yang disebabkan oleh adanya kebijakan revisi anggaran maupun dikarenakan kebijakan program prioritas dan strategis dari Kabupaten Banyumas, sehingga perlu suatu Rencana Aksi yang disesuaikan dengan RKA dan Rencana Operasional Kegiatan, sehingga dapat ditentukan Prioritas Kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan sesuai RPJMND dan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.4. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

3.4.1. Efektivitas Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, diuraikan melalui target dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Selanjutnya akan

diuraikan tentang analisis efisiensi anggaran pada masing-masing tujuan/sasaran dengan membandingkan antara realisasi keuangan dan realisasi kinerja. Dikatakan efisien jika capaian realisasi kinerja minimal 100%, dengan angka sama atau lebih tinggi dari realisasi keuangan. Dikatakan tidak efisien jika capaian realisasi kinerja di bawah 100%, atau angkanya di bawah capaian realisasi keuangan.

Efektivitas anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terhadap Capaian Indikator Kinerja diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan Tahun 2025 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dengan adanya indikator kinerja, satuan kerja dapat menentukan tahapan dan besaran anggarannya untuk mencapai kinerja yang tercermin dalam indikator kinerja, dimana perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.14. dibawah ini.

Tabel 3.14. Efektivitas Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Perbandingan (%)
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	1,321,121,001,966.91	1,251,224,132,122.00	94.71
JUMLAH			1,321,121,001,966.91	1,251,224,132,122.00	94.71

Sumber: e-Monev dan Jegos Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, efektivitas pelaksanaan anggaran untuk Indikator Kinerja yang ditetapkan melalui DPA Perubahan Nomor DPPA: DPPA/A.3/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 sebesar Rp.1,321,121,001,966.91, sedangkan realisasi anggaran untuk pelaksanaan anggaran pada capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebesar Rp.1,251,224,132,122.00. Sehingga dapat diambil suatu Kesimpulan bahwa capaian realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dilaksanakan dengan prosentase 94,71%. Realisasi alokasi anggaran tersebut belum termasuk Realisasi yang pencairan tidak melalui SIPD Penatausahaan yaitu BOS SD, BOS SMP, BOP PAUD, BOP Kesenjangan dan TPG. Realisasi Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja di Dinas Pendidikan TINGGI, capaian ini dikarenakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, antara lain: Kepemimpinan dan komitmen, Penyempurnaan sistem administrasi, Penghargaan dan sanksi, Keinginan yang kuat, Sumber daya yang cukup.

**Tabel 3.15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	99,85%	1,251,224,132,122	97,29
JUMLAH			99,85%	1,251,224,132,122	97,29

Sumber: e-Monev dan Jegos Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi pelaksanaan anggaran untuk Indikator Kinerja yang ditetapkan sesuai dengan realisasi anggaran pada capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebesar Rp.1,251,224,132,122.00 Sehingga capaian realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dilaksanakan dengan prosentase 97,29%. Dimana Realisasi Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja di Dinas Pendidikan TINGGI, capaian ini dikarenakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, antara lain: Kepemimpinan dan komitmen, Penyempurnaan sistem administrasi, Penghargaan dan sanksi, Keinginan yang kuat, Sumber daya yang cukup.

3.4.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas disajikan pada tabel 3.16. berikut dibawah ini.:

Tabel 3.16. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Tujuan: Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	99,85%	97,29%	-
2	Sasaran: Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan	APK PAUD	108,76%	97.08%	100%
		APK SD/Mi	89,15%	99.12%	-
		APK SMP/MTs	118,61%	98.75%	100%

Sumber: e-Monev dan Jegos Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan dalam penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai Tujuan: Meningkatkan Derajat Pendidikan

Masyarakat melalui Indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, penggunaan anggaran sebesar 97,29% dengan persentase kinerja sebesar 99,85%. Adapun Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dari tujuan belum dilakukan secara efisien dikarenakan capaian kinerja belum dapat memenuhi Target yang telah ditetapkan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai Sasaran: Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan melalui Indikator Kinerja:

1. APK PAUD, pelaksanaan penggunaan anggaran dalam memenuhi capaian kinerja melalui APK PAUD sebesar 97,08% dengan persentase kinerja sebesar 108,76%. Adapun Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dari sasaran 1 yakni APK PAUD telah dilakukan secara efisien dikarenakan capaian kinerja telah melampaui Target yang telah ditetapkan.
2. APK SD/MI, pelaksanaan penggunaan anggaran dalam memenuhi capaian kinerja melalui APK SD/MI sebesar 99,12% dengan persentase kinerja sebesar 89,15%. Adapun Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dari sasaran 2 yakni APK SD/MI belum dilakukan secara efisien dikarenakan capaian kinerja tidak memenuhi Target yang telah ditetapkan.
3. APK SMP/MTS, pelaksanaan penggunaan anggaran dalam memenuhi capaian kinerja melalui APK SMP/MTS sebesar 98,75% dengan persentase kinerja sebesar 118,61%. Adapun Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dari sasaran 3 yakni APK SMP/MTs telah dilakukan secara efisien dikarenakan capaian kinerja telah melampaui Target yang telah ditetapkan.

Efisiensi ini capaian ini dipengaruhi dari komitmen pimpinan dan pelaksana teknis dalam menjalankan Program Strategis dan Arah Kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Banyumas melalui dukungan SDM dan Sarana prasarana Pendidikan dalam memberikan kontribusi dalam efisiensi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan. Adapun beberapa analisis efisiensi penggunaan sumber daya lainnya.

Informasi dalam capaian kinerja sudah menjadi perhatian dan kepedulian penuh mulai dari pimpinan Dinas Pendidikan sampai pelaksana dimana informasi tersebut telah dimanfaatkan dalam menyesuaikan aktifitas pencapaian kinerja, penyesuaian anggaran, evaluasi pencapaian kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya dan memberikan perubahan yang positif dalam budaya kinerja organisasi. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan berbagai aktivitas seperti Rapat Monev Triwulanan Dinas Pendidikan Kabupaten

Banyumas, DPPA 2025, Monev dan Pengukuran Kinerja kegiatan/sub kegiatan, Renja 2025 dan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.

3.4.3. Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Perbandingan anggaran dan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.17. dibawah ini:

Tabel 3.17. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Paket	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi PBJ (Rp)	Pengadaan Selesai (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	Pengadaan Langsung	245	62,271,514,660	30,975,957,700	28,064,515,368	2,911,442,332
2	E-Purchasing	399		11,647,207,689	11,521,135,689	126,072,000
3	Tender	15		9,040,105,728	9,040,105,728	-
4	Seleksi	1		349,872,000	340,553,550	9,318,450
JUMLAH		660	62,271,514,660	52,013,143,117	48,966,310,335	3,046,832,782

Sumber: Data LPSE Dinas Pendidikan Tahun 2025 dari <https://lpse.banyumaskab.go.id/eproc4/amel/rekap>

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Pada Tahun 2025, berdasarkan data diatas telah dilaksanakan sebanyak 245 paket Pekerjaan dengan Total Realisasi PBJ sebesar Rp.30,975,957,700.00 dengan realisasi nilai kontrak atau pengadaan selesai sebesar Rp.28,064,515,368.00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2,911,442,332.00. Atau 9,40% dari Total Realisasi PBJ yang tercatat pada Tabel diatas.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas lingkup Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 38 Paket pekerjaan dengan total Realisasi PBJ sebesar Rp.9,040,105,728.00 dengan realisasi nilai kontrak atau pengadaan selesai sebesar Rp.9,040,105,728.00. sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi anggaran atau 0.00%.

Pelaksanaan Seleksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas lingkup Dinas Pendidikan yang dilaksanakan sebanyak 1 paket pekerjaan dengan total Realisasi PBJ sebesar Rp.349,872,000.00 dengan realisasi nilai kontrak atau pengadaan selesai sebesar Rp.340,553,550.00., berdasarkan data yang ada terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.9,318,450.00 atau 2.66%.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 399 Paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp.11,647,207,689.00 dengan realisasi nilai kontrak atau pengadaan selesai sebesar Rp.11,521,135,689.00, sehingga disimpulkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.126,072,000.00 atau 1.08%.

3.5. PRESTASI, PENGHARGAAN DAN INOVASI

3.5.1. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada TA. 2025 adalah sebagai berikut:

1. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Jenjang SD Tahun 2025.
 - a. **Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)** merupakan lomba berjenjang yang dilaksanakan mulai dari Tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) 2025 adalah ajang puncak revitalisasi bahasa daerah yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa Kemendikdasmen untuk melestarikan budaya lokal melalui generasi muda. Festival ini digelar secara serentak di berbagai provinsi sepanjang akhir 2025 (Oktober-November) bagi siswa SD dan SMP dengan berbagai lomba sastra daerah. Jenis Lomba meliputi lomba berpidato, bercerita, menyanyi, menulis/membaca puisi, dan berbalas pantun dalam bahasa daerah masing-masing, tahun 2025 Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) dilaksanakan. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilaksanakan yang bertempat di Kota Syrakarta. Adapun hasil Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Kontingen Kabupaten Banyumas di Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:
 - 1) Juara 1 Komedi Tunggal Putri FTBI Tingkat Provinsi adalah Adzkia Samha Sauva (SDN Pangebatan);
 - 2) Juara 2 Mendongeng Putri FTBI Tingkat Provinsi adalah Adzkia Fadila Hasna (SDN 1 Tanjung);
 - 3) Juara 3 Komedi Tunggal Putra FTBI Tingkat Provinsi adalah Dais Arvin Fabian (SDN Pangebatan); dan

- 4) Juara Harapan 1 Berpidato Putra FTBI Tingkat Provinsi adalah Raditya Sabda Dika (SDN 1 Kranji).
- b. **Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD** merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan jiwa seni peserta didik karena melalui FLS2N SD dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap seni sehingga akan memberikan inspirasi mereka untuk melestarikan kesenian Indonesia dan perlindungan terhadap kekayaan budaya bangsa. Mekanisme FLS2N dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga nasional. Peserta didik yang merupakan perwakilan kecamatan harus terdaftar di Puspresnas untuk selanjutnya mengikuti FLS2N di tingkat kabupaten. Bagi juara I dan juara II pada setiap cabang lomba di Kabupaten Banyumas berhak mengikuti lomba yang sama di tingkat Provinsi. Pelaksanaan FLS2N di Tingkat Provinsi dilaksanakan secara daring dengan mengirimkan video dan hasil karya di Puspresnas. **Peserta cabang lomba Gambar Bercerita a.n. Almira Naema Azkadina Sulistiyadi dari SDN 1 Kranji, Purwokerto Timur berhasil memperoleh Juara I di tingkat provinsi pada tahun 2025.**
- c. Ajang bergengsi Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) tingkat SD se-Jawa Tengah telah sukses diselenggarakan di Kabupaten Purbalingga pada 17-19 Oktober 2025. . Ajang tahunan ini menjadi puncak kompetisi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan seni Islami, yang diikuti oleh juara-juara tingkat kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk memperkuat karakter berakhlak mulia. **Adapun hasil yang diperoleh Kabupaten Banyumas di Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:**
- 1) Kinanditya Rafa Prasetyo (SDN 1 Teluk), Juara 1 Cerita Islami putra MAPSI Tingkat Provinsi;
 - 2) Khanza Putri Firmansyah (SDN Kembaran), Juara 1 Macapat putri MAPSI Tingkat Provinsi;
 - 3) Ibrahim Qaiser El Azzam (SD IT Harapan Bunda 1 Purwokerto), Juara 2 Kaligrafi putra MAPSI Tingkat Provinsi;
 - 4) Alesha Vinta Prabantantyo (SDN 2 Tinggarjaya), Juara harapan 1 wudhu dan shalat Putri MAPSI Tingkat Provinsi;
 - 5) Nazhefa Al Muhammad Zafran (SDN 1 Arcawinangun), Juara harapan 1 Macapat putra MAPSI Tingkat Provinsi;
 - 6) Sebastian Abyaz Kusuma (SD Islam Al Azhar 39 Purwokerto), Juara harapan 2 Azan dan Iqomah MAPSI Tingkat Provinsi;
 - 7) Naufal Alendra Syahputra (SDN 2 Papringan), Juara harapan 3 khot putra MAPSI Tingkat Provinsi;

- 8) Lilla Fausti Ividinia (SDN 1 Sokanegara), Juara harapan 3 TIKI putri MAPSI Tingkat Provinsi;
 - 9) Veysi Hasna Nabila (SDN 1 Kranji), Juara harapan 1 cerita islami putri MAPSI Tingkat Provinsi; dan
 - 10) Marvel Devananda Putra dan Ratri Rahma Rianti (SDN 4 Kranji), Juara harapan 2 duet lagu religi MAPSI Tingkat Provinsi.
- d. **Lomba Mendongeng Karya Cipta Baru 2025** di Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh BBPMP Jateng, berfokus pada modifikasi cerita rakyat Nusantara berbasis budaya lokal (mitos, legenda, sage, fabel, jenaka) untuk anak PAUD/SD. Wakil dari Kabupaten Banyumas yang mewakili Provinsi Jawa Tengah di tingkat Nasional adalah Maristza Qaireen Al Ayesha (SDN 1 Sokanegara) sebagai Juara 1 Lomba Mendongeng Karya Cipta Baru Tingkat Nasional.
2. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Jenjang SMP Tahun 2025.
- a. **Penyelenggaraan FTBI Jenjang SMP.** Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ikut memeriahkan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kota Surakarta (solo) pada 14-16 Oktober 2025. . Ajang ini memecahkan rekor MURI dengan 1120 siswa menulis geguritan secara serentak di Graha Saba Buana, memfokuskan pada pelestarian bahasa dan sastra Jawa bagi generasi muda. Hasil perjuangan kontingen SMP dari Kabupaten Banyumas berhasil meraih prestasi:
 - 1) Gegana Eza Nendy Al Razaq dari SMP 2 Rawalo, Juara II cabang lomba Ndhagel Ijen;
 - 2) Danu Zhafran Aqilla dari SMPN 2 Purwojati, Juara III cabang lomba Pidhato Putra;
 - 3) Hafiza Khaira Lubna dari SMPN 3 Purwokerto, Juara Harapan III cabang lomba Ndongeng Putri; dan
 - 4) Yolanda Octaviani dari SMPN 1 Kemranjen, Juara Harapan III cabang lomba Nulis Cerkak Putri.
 - b. **Penyelenggaraan MAPSI SMP Tingkat Provinsi.** Lomba MAPSI bertujuan Lomba Membentuk karakter dan mental generasi muda, Melatih keterampilan mereka berdasarkan ajaran Islam, Memberikan motivasi kepada anak, Meningkatkan sportifitas dan dapat memunculkan bakat anak-anak, Membina pendidikan karakter anak. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) Tingkat Provinsi Jawa Tengah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke-XIV sukses digelar di Kabupaten Banyumas pada 21-23 Oktober 2025. Acara ini menjadi

ajang bergengsi untuk 12 cabang lomba, termasuk Tahfiz, Tilawah, Kaligrafi, Pidato, Cerdas Cermat Islami (LCCI), dan Rebana. Kabupaten Banyumas telah mengikuti MAPSI tingkat Provinsi Jawa Tengah SMP ke-XIV dengan mengantongi prestasi sebagai berikut:

- 1) Juara 1 Tartil Putra adalah Athar Laksana Wibowo dari SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto;
 - 2) Juara 3 Pidato Putra adalah Malvino Athallah Messi dari SMPN 2 Purwokerto;
 - 3) Juara 3 Pidato Putri adalah Nada Maulida Zakiyya dari SMPN 1 Ajibarang;
 - 4) Juara Harapan III Kaligrafi Putra adalah Panji Satriani Hidayanto dari SMPN 2 Purwokerto
- c. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). O2SN Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diselenggarakan secara daring/hibrida, dengan pembukaan untuk SD/SMP pada Juli 2025 dan SMA/SMK pada 9 Juli 2025 di Solo. Ajang ini mempertandingkan cabang seperti karate, pencak silat, dan senam untuk mencetak talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045, dengan juara 1-2 tingkat provinsi melaju ke tingkat nasional. Kabupaten Banyumas telah mengikuti O2SN jenjang SMP dengan mengantongi prestasi sebagai berikut **Farras Aufa Khumairah dari SMPN 4 Purwokerto menjadi Juara III dari cabang lomba Karate Putri.**
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas juga mendapatkan Penghargaan yang dicapai secara Individu yakni:
- a. Pendiri sekaligus pengajar di PKBM “Tunas” Banjarsari, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas yakni Ibu Umi Salamah menerima penghargaan “Anugerah Guru Indonesia 2025” langsung dari Presiden RI H. Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat, 28 November 2025. Penghargaan bergengsi itu diberikan kepada tiga guru hebat sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap pendidik berdedikasi yang memberi dampak besar bagi kelompok masyarakat terpinggirkan dan membutuhkan akses pendidikan alternatif. Ibu Umi Salamah dikenal sebagai sosok yang membuka pintu rumahnya untuk belajar bagi siapa saja, mulai dari peserta didik Kejar Paket B hingga anak-anak berkebutuhan khusus, yang selama ini sulit menjangkau pendidikan formal.;
 - b. Yusep Kurniawan, S.Pd, M.Pd sebagai peringkat 3 terbaik tingkat nasional Anugerah Guru Prima dalam rangka HUT Ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025 kategori Kepala/Pengawas Sekolah; dan

- c. Insan pendidik Banyumas juga mencatat prestasi lain. Tim guru SD Negeri Sokaraja Kidul, Deadline Defenders Jadul, meraih Juara 3 Hackathon Rumah Pendidikan 2025 berkat inovasi Game Edukasi Interaktif berbasis web yang memanfaatkan teknologi AI Google Gemini.ai dan Canva Code di acara Anugerah Data dan Teknologi Informasi Pendidikan yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta.
- 4. Adapun beberapa penghargaan Dinas Pendidikan dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, diantaranya:
 - a. SD Negeri Cibun, Kecamatan Karanglewas Masuk 20 Besar Indeks Kualitas Dapodik Tingkat Jawa Tengah Sebagai basis data tunggal pendidikan nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berperan krusial dalam menyediakan informasi akurat, mutakhir, dan berkelanjutan bagi kebijakan pendidikan. Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara konsisten melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan tetap terpercaya.

Salah satu instrumen untuk mengukur kualitas tersebut adalah Indeks Kualitas Dapodik (IKD). Penilaian IKD didasarkan pada tiga indikator utama: Kelengkapan, Kevalidan, dan Kemutakhiran data. Kelengkapan mengukur keterisian seluruh komponen data satuan pendidikan. Validitas memastikan kesesuaian data dengan aturan pengisian yang berlaku. Kemutakhiran menilai pembaruan data secara rutin agar tetap relevan dan faktual.

Berdasarkan hasil evaluasi IKD terbaru, SD Negeri Cibun Korwilcam Dindik Karanglewas berhasil menorehkan prestasi dengan menempati posisi 20 besar tingkat Provinsi Jawa Tengah. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, mengingat penilaian dilakukan dengan melibatkan seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK baik negeri maupun swasta. Peringkat IKD 20 ditempati oleh SD Negeri Cibun, Karanglewas, Banyumas. Sehingga diharapkan kedepan, Pentingnya peningkatan kualitas data di setiap satuan pendidikan lingkup Kabupaten Banyumas sebagai upaya mendukung tata kelola informasi pendidikan yang efektif dan akuntabel. Kualitas data yang baik tidak hanya mencerminkan kinerja operator, tetapi juga menjadi indikator manajemen sekolah dalam mengelola informasi pendidikan secara profesional. Guru Kelas adalah garda terdepan sebagai Operator Dapodik SD Negeri Cibun, Laela Safitri, membagikan kunci keberhasilannya dalam menjaga kualitas Dapodik sekolah. Pengelolaan Dapodik yang baik

dimulai dari ketelitian dan kedisiplinan. Setiap data siswa, guru, dan sarpras harus diperbarui secara berkala agar valid dan akurat.

- b. Dinas Pendidikan melalui SKB Ajibarang yang merupakan salah satu Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Banyumas meraih penghargaan pada acara Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional dengan Tema "Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua" pada Senin, 26 Mei 2025 dengan Kategori Penghargaan; dan
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mendapatkan Penghargaan Nasional Pemanfaatan Data Pendidikan dengan meraih penghargaan nasional atas konsistensi dan keberhasilan dalam pemanfaatan data serta teknologi informasi pendidikan, yang diserahkan pada malam Anugerah Data dan Teknologi Informasi Pendidikan di Jakarta, 15 Desember 2025. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., kepada Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.



3.5.2. Inovasi Dinas Pendidikan

Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 lebih memfokuskan kepada penyusunan suatu aplikasi sederhana yang dapat membantu pelaksanaan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas jauh lebih mudah, diantaranya:

1. **SI KIPER MANTAP.** Integrasi Kinerja Operator Sekolah Dalam Percepatan Pencairan Tunjangan Profesi Guru. Senin, 22 September 2025 bertempat di Aula Ing Ngarso Sung Tuladha Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas diluncurkanlah SI KIPER MANTAP dihadiri oleh Ketua MKKS Kabupaten dan 73 operator SMP Negeri di Kabupaten Banyumas. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus berinovasi dalam peningkatan pelayanan publik yang cepat, transparan dan berbasis digital. SI KIPER MANTAP hadir sebagai

bagian dari inovasi guna percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Lutfi Hidayat, S.Pd. Kasi PGTK SMP sebagai project leader aksi perubahan ini menyampaikan latar belakang dari SI KIPER MANTAP yaitu masih adanya keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akibat belum optimalnya integrasi kinerja operator sekolah dengan operator dinas, lemahnya validasi data Dapodik dan Info GTK, serta rendahnya literasi digital sebagian operator sekolah.

Tujuan utama inovasi ini adalah terwujudnya sistem integrasi antar operator sekolah dan dinas yang mampu mendukung percepatan, ketepatan, dan akuntabilitas pencairan TPG. Adapun hasil yang diharapkan dari implementasi SI KIPER MANTAP adalah meningkatnya kinerja operator sekolah dalam pengelolaan data, validitas Info GTK, serta percepatan penerbitan SKTP sehingga pencairan TPG dapat dilakukan tepat waktu. peran Kepala Sekolah serta Guru Penerima TPG untuk selalu mengupdate isian data di Dapodik melalui operator sekolah sebagai pengelola data Dapodik, sehingga data dapodik valid.

2. **SIPADIMAS.** Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggagas Inovasi SIPADIMAS (Semangat Inovasi untuk Optimalisasi Pelayanan Pengurusan Administrasi Dokumen Perbaikan dan Penggantian Ijazah di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas). Aplikasi ini merupakan bagian dari aksi perubahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan pengurusan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah (SKKPI) dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI).

SIPADIMAS merupakan aksi perubahan yang digagas oleh Muhamad Robani, S.Pd. M.Pd. (Kasi Kurikulum SD Dindik Banyumas) sebagai project leader sekaligus peserta PKP Angkatan IX Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Dimana, latar belakang lahirnya inovasi ini dilatarbelakangi masih ditemukannya kendala dalam pelayanan manual, seperti pengurusan berulang akibat kesalahan redaksional dan ketidaklengkapan berkas. “Tanpa adanya terobosan digital, pelayanan publik akan lambat, berisiko pungutan liar, dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

3. **SIKUDAPONIMAS.** Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Data Pokok Pendidikan Kabupaten Banyumas. Inisiatif yang lahir dari gagasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bp. Drs. Joko Wiyono M.Si merupakan langkah strategis dalam mewujudkan integrasi data pendidikan berbasis Dapodik yang dipadukan dengan data kependudukan dari Dindukcapil serta data sosial dari Dinsospermades. Dengan lahirnya

SIKUDAPONIMAS, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengambil langkah maju untuk membangun sistem pelayanan yang terintegrasi, modern, dan berpihak pada kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi transformasi digital pendidikan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

BAB IV.

Penutup



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum, Dinas Pendidikan telah berhasil merealisasikan program-program strategis dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025, yang dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai **Tujuan yakni Meningkatkan Derajat Pendidikan melalui Indikator Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan pada tahun 2025. HLS Tahun 2025 adalah sebesar 13,53 tahun, artinya anak usia 7 (tujuh) tahun keatas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 13,53 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan minimal sampai dengan lulus SMA dan rata-rata telah mengenyam pendidikan tinggi Diploma I atau Diploma II atau minimal hingga semester 3 pada perguruan tinggi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan dalam Pencapaian Target Tujuan Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, berupa Angka Harapan Lama Sekolah. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target Tujuan Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat sebagai amanah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melalui Angka Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada Penyebab kegagalan dalam pencapaian target capaian Indikator Kinerja adalah:

1. Dinamika Peserta Didik. Adanya residu dampak ekonomi yang menyebabkan sebagian kecil anak usia sekolah lebih memilih bekerja atau membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Angka Putus Sekolah (Drop-out) di Transisi Jenjang. Terjadinya kebocoran jumlah siswa pada masa transisi, terutama dari tingkat SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK (meskipun SMA/SMK merupakan kewenangan Provinsi, inputnya sangat bergantung pada lulusan SMP di Kabupaten Banyumas);
3. Faktor Sosio-Kultural. Di beberapa wilayah kecamatan di Banyumas, masih terdapat pola pikir yang memprioritaskan bekerja di sektor informal atau pernikahan dini dibandingkan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi; dan
4. Migrasi Penduduk. Adanya Perpindahan penduduk usia sekolah keluar dari wilayah Kabupaten Banyumas yang tidak selalu dilaporkan secara real-time di Dapodik, sehingga mempengaruhi basis perhitungan angka harapan lama sekolah.

Untuk menekan gap antara target dan capaian realisasi Tujuan Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, berupa Angka Harapan Lama Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas telah melakukan langkah-langkah strategis: Adapun solusi yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan diantaranya melalui:

- 1. Program Intervensi Langsung**, melalui:
 - a. Optimalisasi Beasiswa (Trilas Bupati). Penyaluran bantuan bagi siswa berprestasi dan miskin (khususnya target 3.000 siswa SD dan 1.800 siswa SMP) guna meminimalisir risiko putus sekolah akibat biaya; dan
 - b. Program Pasti Sekolah. Melakukan penyisiran terhadap anak tidak sekolah (ATS) melalui kolaborasi dengan Pemerintah Desa untuk menarik mereka kembali ke jalur pendidikan formal maupun non-formal (Paket A, B, dan C).

2. Peningkatan Akses dan Sarana, melalui:

- a. Rehabilitasi Gedung Sekolah. Melakukan perbaikan sarana prasarana (target 730 rehab) untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk tetap bersekolah;
- b. Penyediaan Transportasi/Akses. Memberikan kemudahan akses bagi sekolah-sekolah di wilayah yang sulit dijangkau untuk memastikan kehadiran siswa terjaga.

3. Strategi Digitalisasi dan Data, melalui:

- a. Penguatan Dapodik. Melakukan validasi data secara berkala untuk memastikan setiap siswa terdaftar secara akurat, sehingga angka HLS yang dihitung oleh BPS berdasarkan data lapangan sinkron dengan data administratif;
- b. Modernisasi Ekosistem Belajar. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat sekolah lebih menarik bagi generasi Z dan Alpha, sehingga menekan angka kebosanan yang memicu putus sekolah.

4. Koordinasi Lintas Sektoral, melalui Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi. Koordinasi intensif terkait penyerapan lulusan SMP ke jenjang SMA/SMK agar tetap berada dalam sistem pendidikan, mengingat HLS menghitung ekspektasi lama sekolah dari umur 7 tahun ke atas.

5. Perluasan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah. Adanya kemudahan akses baik secara geografis maupun administratif bagi lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMA/SMK, serta meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi di wilayah Banyumas yang menarik minat lulusan menengah melalui:

- a. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non-Formal. Optimalisasi Satuan Bakti Pendidikan: Mendorong peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM melalui program Kejar Paket untuk menarik kembali anak putus sekolah ke dalam sistem pendidikan;
- b. Link and Match: Memperkuat kerja sama antara SMK dengan dunia industri untuk memastikan lulusan memiliki nilai tawar tinggi, yang secara tidak langsung memotivasi siswa untuk menyelesaikan sekolah.

6. Membangun Modernisasi Ekosistem Belajar. Membangun ekosistem belajar digital yang membuat proses pembelajaran lebih relevan dengan perkembangan zaman, sehingga mengurangi kebosanan siswa (demotivasi belajar);

7. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Pendidikan. Kampanye berkelanjutan mengenai pentingnya pendidikan di atas 12 tahun mulai mengubah pola pikir masyarakat dari "cepat kerja" menjadi "sekolah tinggi untuk karier lebih baik, melalui:

- a. Melakukan kampanye dan sosialisasi bagi orang-orang dewasa yang belum menamatkan pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau

bahkan pendidikan tinggi untuk kembali lagi masuk ke pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C;

- b. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan PKBM untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan keaksaraan (memberantas buta aksara) khususnya bagi orang tua; dan
- c. Melakukan kerjasama antara Pemda Kabupaten Banyumas dengan pihak swasta dalam membangun kesepakatan mendukung perencanaan strategis pembangunan khususnya bidang pendidikan dengan ikut memberikan timbal balik berupa Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan seperti membangun sarana sekolah, pembiayaan bagi program Paket B, Paket C, beasiswa siswa kurang mampu dan lain-lain.

8. Meningkatkan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun solusi yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui:

- a. Penghitungan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Banyumas serta ditindaklanjuti dengan mengusulkan melalui CPNS dan PPPK; dan
- b. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kurikulum.

Capaian sasaran yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yakni dalam rangka Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan yang ditetapkan melalui penghitungan APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs. Berdasarkan hasil Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat diketahui bahwa capaian sasaran di Tahun 2025 termasuk beragam. Hal tersebut dapat dilihat pada hal-hal, sebagai berikut:

1. APK SD Sederajat (Target: 108,8% dengan Capaian: 97%), secara data, belum Mencapai Target (ada kesenjangan 11,8%), adapun Faktor Penyebab Kegagalan/Hambatan: 1) Target yang Terlalu Tinggi membuat kinerja belum tercapai; 2) Akurasi Data Mutasi. Adanya perpindahan penduduk (siswa) keluar daerah Kabupaten Banyumas yang belum sepenuhnya terhapus dari sistem Dapodik lokal, sehingga penyebut dalam rumus APK tetap tinggi sementara pembilangnya berkurang; dan 3) Efektivitas Program "Kembali ke Sekolah": Program penjangkauan anak putus sekolah di tingkat dasar mungkin belum menjangkau kantong-kantong kemiskinan ekstrem secara presisi di tahun 2025.
2. APK SMP Sederajat (Target: 88,5% dengan Capaian: 104,97%). Berdasarkan data diatas telah Melampaui Target. Adapun Faktor Penyebab Keberhasilan, antara lain: 1) Keberhasilan Program Transisi SD ke SMP. Program

pendampingan kelulusan SD yang masif memastikan hampir seluruh lulusan melanjutkan ke SMP/MTs; dan 2) Migrasi Masuk. Angka di atas 100% menunjukkan bahwa SMP di Kabupaten Banyumas menjadi magnet bagi siswa dari luar kabupaten (perbatasan), yang menunjukkan kualitas mutu pendidikan SMP di Banyumas diakui lebih baik.

3. APK PAUD (Target: 67% dengan Capaian: 72,87%) Berdasarkan data diatas telah Melampaui Target. Adapun Faktor Penyebab Keberhasilan, antara lain melalui Kesadaran Kolektif Orang Tua. Kampanye mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi karakter mulai diterima luas oleh masyarakat Banyumas.

Capaian Indikator Kinerja dari Program Pengelolaan Pendidikan yakni Meningkatnya Mutu Hasil Belajar Siswa melalui penghitungan APS 5-6 Tahun, APS 7-15 Tahun dan APS 7-18 Tahun Kesetaraan pada:

1. APS 5-6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2025 pada kelompok umur 5–6 tahun di Kabupaten Banyumas tercatat sebesar 82,40% Dimana data tersebut hasil penghitungan dan pengolahan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025, yang menunjukkan tren peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 82,39%. Berdasarkan perhitungan dan pengolahan APS kelompok umur 5–6 tahun di Kabupaten Banyumas lebih tinggi sebesar 11,85 poin dibandingkan APS nasional yang tercatat 70,55%, serta lebih tinggi sebesar 4,43 poin dibandingkan APS Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 77,97%.
2. APS 7-15. Angka Partisipasi Sekolah capaian tahun 2025 pada Jenis Kelompok Umur 7-15 Tahun di Kabupaten Banyumas belum resmi diterbitkan secara public oleh BPS Kabupaten Banyumas maupun BBPMP Provinsi Jawa Tengah, sehingga data yang masih digunakan adalah APS 7-15 di Kabupaten Banyumas menggunakan Data APS 7-15 Tahun 2024. Walaupun begitu, APS 7-15 berdasarkan capaian tahun 2023-2024 menunjukkan komitmen tinggi terhadap pendidikan dasar. Meskipun data resmi Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun untuk capaian 2025 di Kabupaten Banyumas belum diterbitkan, tren historis menunjukkan angka yang sangat stabil di angka tinggi (biasanya di atas 99%). Kondisi ini mencerminkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Banyumas sudah terserap ke dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal.
3. APS 7-18 Tahun Kesetaraan. Angka Partisipasi Sekolah capaian tahun 2025 pada Jenis Kelompok Umur 7-18 Tahun di Kabupaten Banyumas belum resmi diterbitkan secara public oleh BPS Kabupaten Banyumas maupun BBPMP Provinsi Jawa Tengah.

Capaian Indikator Kinerja dari Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yakni Meningkatnya Pemerataan Pendidikan yang bermutu

melalui Persentase formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terpenuhi. Secara statistik, meskipun angka realisasi berada di bawah target, tingkat capaian kinerja terhadap target sudah berada di angka 90,35% (Kategori Tinggi/Baik), namun belum mencapai kategori Sangat Tinggi karena belum menembus angka 91%. Capaian 82,22% menunjukkan bahwa upaya pemerataan tenaga pendidik di Banyumas sudah berada pada jalur yang benar, namun terhambat oleh kebijakan rekrutmen nasional dan dinamika pensiun. Fokus utama ke depan adalah memastikan bahwa kekurangan sebesar 8,60% tersebut tidak menumpuk di satu wilayah tertentu (disparitas), melainkan tersebar secara merata agar tidak mengganggu mutu pendidikan secara keseluruhan.

Capaian Indikator Kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yakni Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah melalui Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah. Capaian 100% pada indikator ini menunjukkan bahwa mekanisme internal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 bekerja dengan sangat efisien. Fokus untuk periode berikutnya adalah mempertahankan konsistensi ini (sustainability) sambil terus mencari celah untuk melakukan inovasi digital guna meningkatkan kecepatan layanan penunjang tersebut. Keberhasilan mencapai angka mutlak 100%.

Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam pencapaian Indikator Program/Kegiatan melalui Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan pada Tahun 2025, diantaranya:

1. **Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD** terhadap Target Renstra di Kabupaten Banyumas tidak disertakan dalam penghitungan pada BPS di Kabupaten Banyumas mulai Tahun 2023 s.d. 2024 tidak tersedia. Walaupun tidak ada penghitungan APK PAUD oleh BPS, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas melakukan pengolahan dan penghitungan sesuai formulasi APK PAUD sehingga capaian APK PAUD tahun 2025 tercatat sebesar 72,87%. Dimana berdasarkan capaian tahun 2025 APK PAUD Tahun 2025 mengalami peningkatan kemajuan realisasi capaian sebesar 100,41% dari perbandingan Target Akhir Renstra 2024-2026 yang tercatat sebesar 66%;
2. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI** terdapat Target Renstra dan capaian Persentase Sasaran di Akhir Tahun Renstra 2026 terdapat penurunan kemajuan realisasi capaian sebesar 97% dengan persentase sasaran sebesar 97,19% dari perbandingan Target Akhir Renstra 2024-2026 yang tercatat sebesar 99,8%. Secara operasional, Dinas Pendidikan telah berhasil mempertahankan akses pendidikan dasar bagi mayoritas masyarakat. Hasil ini disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tidak mencapai target renstra yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya: a) Penurunan

ini menjadi sinyal penting untuk melakukan cleansing data peserta didik di akhir tahun Renstra 2026 guna memastikan apakah penurunan disebabkan oleh anak yang tidak sekolah atau murni karena pergeseran jumlah penduduk (faktor demografis); b) Penurunan APK seringkali dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk usia 7-15 tahun. Jika jumlah anak usia tersebut berkurang namun kapasitas sekolah tetap, angka APK secara otomatis akan terkoreksi mengikuti data kependudukan riil. Sehingga pada tahun-tahun mendatang diperlukan fokus kebijakan di tahun terakhir harus diarahkan pada penyisiran anak tidak sekolah (ATS) di kantong-kantong wilayah tertentu agar realisasi 97% dapat ditingkatkan mendekati target akhir; dan

3. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs** di Kabupaten Banyumas tahun 2025 tercatat sebesar 104,97%. Sehingga APK SMP/MTs tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Target Renstra Tahun 2026 baru mencapai 96.30%. Hasil ini disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP tidak mencapai target resntra yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya: (a) Faktor pendidikan orang dewasa, seperti melek huruf laki-laki; (b) Faktor ekonomi, seperti pengeluaran untuk pendidikan; (c) Faktor guru, seperti rasio murid terhadap guru; dan (d) Faktor jumlah sekolah, seperti rasio murid terhadap sekolah.

Adapun **Upaya-upaya atau Solusi yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan capaian APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs** tersebut, antara lain:

1. **APK SD Sederajat**, solusi peningkatan capaian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan: 1) Melakukan validasi data cleansing antara Dapodik dengan data kependudukan (Disdukcapil); dan 2) Revaluasi penetapan target pada dokumen perencanaan agar lebih realistis sesuai dengan tren demografi (angka kelahiran);
2. **APK SMP Sederajat**. Solusi peningkatan capain dilakukan melalui: 1) Penyediaan transportasi sekolah gratis atau subsidi di jalur-jalur rawan putus sekolah; 2) Digitalisasi ruang kelas yang membuat lingkungan belajar SMP lebih kompetitif; dan 3) Daya Tarik Sekolah Terbuka dan Sekolah Satu Atap. Penguatan SMP Terbuka dan Sekolah Satu Atap (Satap) di wilayah geografis sulit di Banyumas bisa menarik anak-anak yang sebelumnya terkendala jarak;
3. **APK PAUD**. Solusi peningkatan capain dilakukan melalui: 1) Insentif Guru PAUD. Pemberian insentif atau peningkatan kesejahteraan bagi pendidik PAUD meningkatkan semangat pelayanan dan operasional lembaga PAUD di desa-desa; 2) Program Satu Desa Satu PAUD, adanya Komitmen pemerintah daerah dalam memperluas layanan PAUD hingga ke tingkat desa/dusun; dan

3) Integrasi PAUD dengan layanan kesehatan (Posyandu) yang memudahkan pemantauan anak usia dini secara menyeluruh.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari adanya anggaran sebagai motor penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan dalam rangka melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil laporan aplikasi e-monev dan Jegos Kabupaten Banyumas tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan Nomor DPA: DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025. Adapun ketersediaan anggaran yang disediakan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang semula sebesar Rp. Rp.1,393,466,277,428.09 pada pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Nomor DPPA: Nomor DPPA: DPPA/A.3/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 menjadi sebesar Rp.1,321,121,001,966.91 (Satu Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Seribu Sembilan Ratus Enam Ratus Enam Puluh Enam Sembilan Puluh Satu Rupiah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai keseluruhan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mengalami perubahan alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada akhir Tahun 2025 mampu melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.1,251,224,132,122.00 (Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Dua) yang mana capaian realisasi alokasi anggaran tersebut belum termasuk Realisasi yang pencairan tidak melalui SIPD Penatausahaan yaitu BOS SD, BOS SMP, BOP PAUD, BOP Kesetaraan dan TPG, sehingga persentase capaian realisasi keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah sebesar 94,71%.;
3. Angka ini di dinilai Tinggi, akan tetapi dapat dipertahankan pada tahun berikutnya, malah dapat ditingkatkan untuk pelaksanaan tahun berikutnya, berdasarkan capaian realisasi tersebut terdapat ketidakefisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai keseluruhan tujuan dan sasaran tersebut.

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas masih terdapat banyaknya kendala dan permasalahan dalam pencapaian target di Tahun 2025, ini menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun anggaran

mendatang. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada progres penyelesaian isu-isu strategis. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui progres penyelesaian isu-isu strategi, antara lain:

1. **Kualitas Sumber Daya Manusia.** Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam memenuhi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan kontribusi efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan tahun-tahun mendatang;
2. **Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Anggaran.** Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola oleh suatu organisasi;
3. **Pemantauan dan Evaluasi.** Pemantauan secara berkelanjutan atas setiap indikator kinerja pelaksanaan anggaran termasuk melakukan monitoring dan evaluasi lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan batas pelaporan terakhir capaian output kinerja dan meninjau penyebab tidak efisien dan efektifnya penyerapan anggaran belanja.;
4. **Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi.** Ketiga hal ini merupakan salah satu hal yang merupakan penyelesaian isu-isu strategis dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, melalui Peningkatan koordinasi dengan seluruh pihak yang mengambil kebijakan dengan pihak yang melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala dan kontinyu; dan
5. **Penetapan Kebijakan.** Menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dalam pencapaian kinerja kegiatan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Banyumas. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya dalam pelayanan pendidikan melalui; a) penetapan kebijakan di bidang pendidikan; b) pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan perlunya koordinasi sesuai delegasi fungsi, urusan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana teknis, satuan pendidikan, para stakeholders, dan masyarakat; c) apresiasi pemberian beasiswa pendidikan dasar (SD dan SMP) bagi siswa berprestasi, dan kurang mampu; d) pengelolaan Dana BOS bagi jenjang SD dan SMP lebih tepat sasaran untuk membantu peserta didik; e) melakukan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Banyumas; f) melakukan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibidang akademik maupun non akademik; g) melakukan optimalisasi penggunaan ruang-ruang sekolah atau Regrouping Sekolah; dan h) sinergitas antara program pengentasan kemiskinan yang diprogramkan

oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka Penanggulangan Anak Tidak Sekolah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada khususnya dan Kabupaten Banyumas pada umumnya, serta menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. Joko Wiyono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660217 19990303 1 002

DINAS PENDIDIKAN

+0281-635220

dindik.banyumaskab.go.id

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75,
Karangbawang, Purwokerto Kulon, Kec.
Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53142

